



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Paringin, Januari 2024

Sekretaris DPRD

Kabupaten Balangan

**H.TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP**

**NIP. 19731224 199403 1 007**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023 telah menyajikan Capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan berkaitan dengan perencanaan kinerja tahun 2023. Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan telah mencapai target Renstra 2021-2026 sesuai dengan sasaran yang di tetapkan.

Adapun sasaran strategis yang di targetkan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan adalah “Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ”

sedangkan indikator kinerja dari sasaran strategis adalah “Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “

Tabel IV.1														
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026														
No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir RPJMD	Keterangan
			2021	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	65	70	72	74	75		Lama
	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	IKM Pelayanan kepada semua anggota Dewan	Baik	Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	IKM Pelayanan kepada semua anggota Dewan	Sangat Baik	84,88	84,98	84,98	85,18	85,50	85,50	Revisi sesuai cashcading
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai SAKIP )	Baik	Sangat Baik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai SAKIP )	Baik	65	70	72	74	75	78,20	Revisi Sesua Renja 2024 di SIPD RI
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai SAKIP )	Baik	Sangat Baik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai SAKIP )	Baik	63,15	71,20					Realisasi

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ada 2 ( dua ) program yang di fasilitasi

yakni :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Capaian Realisasi ;

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 87 % dengan realisasi anggaran 32.430.508.942,- dari pagu anggaran 37.608.214.776,-
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 84 % realisasi anggaran 23.146.694.214,- dari pagu anggaran 27.536.147.700,-

Capaian Kinerja ;

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dengan nilai SAKIP tahun 2022 72,20 dengan predikat BB. Target Capaian Renstra Sekretariat DPRD telah Tercapai.
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) di semester II 84,98 dengan predikat Sangat Baik Kumpulan dari 6 unsur pelayanan yang ada di Sekretariat DPRD masih ada beberapa sub pelayanan yang memang masih kurang maksimal memberikan pelayanan yang baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedepan terus menjadi perhatian perbaikan pelayanan terbaik memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Faktor yang mempengaruhi ;

- Dukungan yang tinggi dari pemerintah daerah dalam menunjang anggaran demi terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan ke depan, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja DPRD harus di sepakati Bersama internal DPRD sebelum penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun berikutnya.
2. .Persetujuan bersama tahapan pembahasan raperda menjadi raperda yang di sampaikan ke bagian hukum dengan tujuan tahapan pembahasan raperda sudah ke tingkatan hasil siap di perdakan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk fasilitasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

4. Menyediakan Pakar ahli pendamping pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
BAB.I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Isu isu Strategis .....	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
A. Sekretaris DPRD.....	4
B. Bagian Umum dan Keuangan .....	5
C. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.....	8
D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.....	10
4. STRUKTUR ORGANISASI .....	15
PETA JABATAN SEKRETARIAT DPRD	
KABUPATEN BALANGAN.....	15
Tabel I. Struktur Organisasi DPRD Balangan.....	15
5. SUMBER DAYA .....	15
6. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	17
BAB II .....	18
PERENCANAAN KINERJA .....	18
1. PENETAPAN KINERJA .....	18
2. RENCANA STRATEGIS.....	20
3. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN	
TAHUN ANGGARAN 2023 .....	

BAB III .....	24
AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	25
I. Pengukuran kinerja Eselon II/Sekretaris Dewan.....	26
II. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Dewan.....	26
III. I. Pengukuran kinerja Eselon III.....	27
IV. Tabel III. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Persidangan &Perundangundangan.....	27
V. Tabel IV. Perbandingan Indikator Kinerja Utama Bagian Persidangan & Peundang-undangan.....	29
VI. Tabel V. Indikator Kinerja Utama Bagian Fasilitasi Penganggaran, dan Pengawasan.....	32
VII. III. Pengukuran kinerja Eselon IV/Kepala Sub Bagian.....	34
VIII. Tabel VI. Indikator Kinerja Utama Sub Bagian Risalah, Persidangan dan Publikasi.....	34
IX. Tabel VII. Capaian Kinerja Sub Bagian Kajian Perundangan-undangan .....	35
X. Tabel VIII. Capaian Kinerja Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran.....	36
Tabel IX. Capaian Kinerja Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.....	37
2. Realisasi Anggaran.....	38
Tabel XI. Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan.....	39
2.1Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan, Hambatan/Kegagalan dan Solusi.....	42
2.2. Analisa atau Efiseinsi Penggunaan Sumber Daya.....	43
3. Kinerja Lainnya .....	44
BAB IV PENUTUP.....	47

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan

Penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Guna memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip

Kabupaten Balangan dalam upayanya mewujudkan *Good governance* dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Selain itu, LKIP tersebut juga amanat dari *pertama* Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *kedua* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *ketiga* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu.

Dengan demikian, ASN yang ditugaskan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan harus mampu mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, adalah :

- **Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD**
- **Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD**
- **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD.**

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 tahun 2014, adalah:

- a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan
- b. Menyelenggarakan Administrasi keuangan
- c. Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta
- d. Menyediakan dan Mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Di dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) hal ini sesuai bunyi penjelasan Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta Kinerja Perangkat Daerah yang Optimal.

Sehubungan dengan itu Sekretariat DPRD sebagai *Supporting Sistem* terhadap Prosedur dan tata kerja Alat Kelengkapan DPRD perlu memberi dukungan baik dukungan teknis, administratif, dan keahlian.

Dukungan tersebut perlu diaplikasikan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) butuh kurun waktu 20 Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah) butuh kurun waktu 5 Tahun, RKPD/RENJA (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan/Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun maupun rencana Strategi yang sejalan, selaras dengan VISI, MISI, dan RPJPD, RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

## 2. Isu isu Strategis

Prioritas Laporan Kinerja SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Adapun permasalahan strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dapat kami rumuskan sbb:

1. Kurangnya kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi;
2. Daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada anggota DPRD sering terjadi mis komunikasi;
3. Belum tersedianya sarana Gedung arsip, tempat penyimpanan barang milik daerah serta aula rapat Paripurna yang cukup menampung tamu dan undangan kapasitas 600 undangan.
4. Belum tersedianya tenaga akar ahli untuk mendampingi dan memeri masukan positif terhadap tugas dan fungsi DPRD;
5. Terjadinya *miss* komunikasi antara Sekretariat dan DPRD tentang pemahaman dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan;

6. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan;
7. Koordinasi dan sinkronisasi yang tidak harmonis di pimpinan, alat kelengkapan, dan komisi, membawa dampak pada kinerja sekretariat DPRD menjadi terganggu;
8. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan;

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretariat DPRD merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang dikepalai oleh seorang Sekretaris, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, dan masing-masing bagian dibantu oleh 2 (dua) Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut:

#### A. Sekretaris DPRD

Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris (Eselon II.b) yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; dan

4. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Eselon III.a) dan masing-masing bagian dibantu oleh 2 (dua) Jabatan Fungsional (Eselon IV.a)

## B. Bidang Umum dan Keuangan

- (1) Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan administrasi umum, program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang program dan keuangan; dan
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang umum.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
  - b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
  - c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
  - e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
  - f. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
  - g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
  - i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
  - j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;

- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 5.

Bidang Umum dan Keuangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bidang Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD lainnya;
  - b. melaksanakan kearsipan;
  - c. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian;
  - d. menyusun dan melaksanakan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;

- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
  
- j. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- k. memfasilitasi penyiapan tempat, konsumsi, daftar hadir dan sarana rapat dan pertemuan;
- l. menyiapkan, menerima, mengendalikan dan mengarahkan delegasi masyarakat, dan/atau unjuk rasa;
- m. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- o. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- p. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- q. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- r. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- s. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 7

- (1) Sub Bidang Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan perencanaan;
  - b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik murni maupun perubahannya;
  - c. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - d. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
  - e. melaksanakan dan merencanakan pemverifikasian keuangan;
  - f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  - g. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan
- (3) Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP)/ Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU)/Belanja Langsung (LS);

- a. merencanakan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;
- b. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renstra), Rencana Kerja SKPD (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja;
- f. menyusun dan membuat dokumen pelaporan keuangan semester dan akhir tahun, SAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan keuangan lainnya;
- g. menganalisis laporan keuangan;
- h. menganalisis laporan kinerja;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bidang Persidangan dan Perundang-undangan Pasal 8

##### Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan

- (1) Bidang Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyiapan dan fasilitasi persidangan serta penyiapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi dan pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang kajian perundang-undangan; dan
  - b. penyusunan program, koordinasi dan pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang persidangan, risalah dan publikasi.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
  - b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  - c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperdainisiatif;
  - d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
  - f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
  - g. menyusun risalah rapat;
  - h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
  - i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM);
  - j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
  - k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
  - l. menyelenggarakan publikasi;
  - m. menyelenggarakan keprotokolan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 9

Bidang Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Hukum dan Kajian Perundang-undangan; dan
- b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Hukum dan Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kajian hukum dan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan kajian hukum dan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft perda inisiatif DPRD;
  - c. membuat konsep penyiapan bahan draft perda inisiatif DPRD;
  - d. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dan inventarisasi

- prioritas produk hukum;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II Raperda selain yang mengatur berkenaan APBD;
  - g. melaksanakan fasilitasi sosialisasi Raperda Inisiatif DPRD;
  - h. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
  - i. membuat draft peraturan DPRD, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Alat Kelengkapan DPRD lainnya; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

## Pasal 11

- (1) Sub Bidang Persidangan, Risalah dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi persidangan, penyusunan risalah serta publikasi kegiatan DPRD.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
  - b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  - c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
  - d. memfasilitasi rapat-rapat dan merencanakan kegiatan DPRD;
  - e. memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan Rencana Kerja DPRD;
  - f. menyusun, mengoordinasikan dan mengelola bahan komunikasi dan publikasi;
  - g. melaksanakan administrasi kunjungan kerja DPRD;
  - h. merencanakan, menyusun dan menyiapkan keprotokolan pimpinan DPRD;
  - i. menghimpun kegiatan DPRD untuk diinformasikan dan dipublikasikan di media gambar, cetak, elektronik dan website; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## C. Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

### Pasal 12

- (1) Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyiapan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang fasilitasi penganggaran; dan
  - b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian di bidang fasilitasi pengawasan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;

- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
  - g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
  - h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan persiapan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan mempunyai fungsi :
- a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang fasilitasi penganggaran; dan

- b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang fasilitasi pengawasan.
- (6) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
  - b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
  - c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
  - d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
  - f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
  - g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
  - h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Pasal 13

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Fasilitasi Penganggaran; dan
- b. Sub Bidang Fasilitasi Pengawasan.

### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi penganggaran.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPAS Perubahan;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi fasilitasi pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II Raperda APBD/APBDP;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi pengawasan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD yang berkaitan dengan pengawasan DPRD;
  - c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - f. memfasilitasi reses DPRD;
  - g. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
  - h. menganalisis data/bahan dukungan dan laporan jaringan aspirasi masyarakat;

- i. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- k. memfasilitasi kegiatan inspeksi mendadak (sidak) DPRD;
- l. membuat laporan hasil evaluasi pengawasan DPRD; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

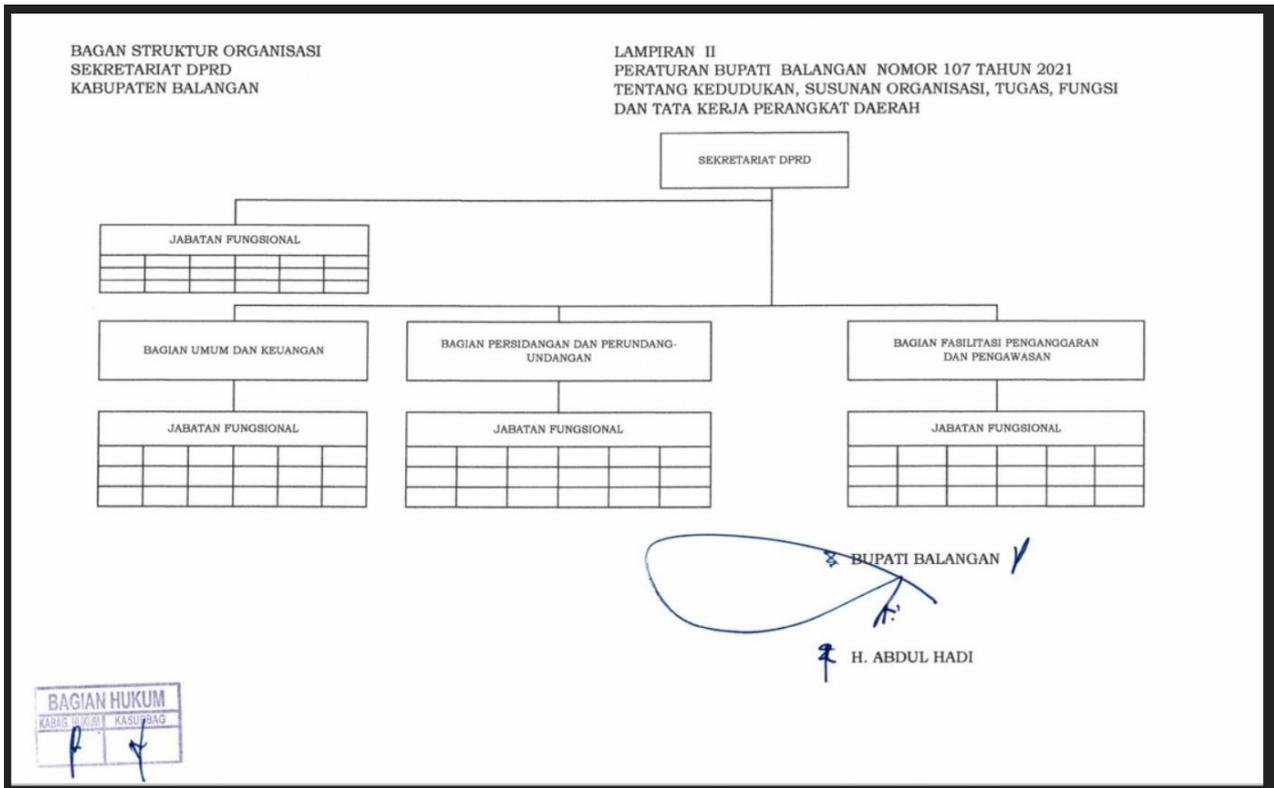
#### 4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**Tabel I. Struktur Organisasi Lama  
Sekretariat DPRD Balangan**



Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,dapat di lihat dibawah ini :



### 3. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan jumlah personil yang berstatus sebagai pegawai ASN berjumlah 22 orang pada kondisi Per Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut

No	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	3	3	
3.	Jabatan Fungsional	6	6	-
4.	Fungsional Umum	12	12	-

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 22 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Laki - laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S - 2	4	3	7
2.	Sarjana S - 1	4	3	7
3.	Sarmud/ DIII	2	1	3
4.	SLTA	4	0	4
5.	SLTP	1	-	1
	Jumlah	15	7	22

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jabatan	Laki - laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	-	-	-
2.	Golongan IV/b	1	-	1
3.	Golongan IV/a	3	2	5
4.	Golongan III/d	1	-	1
5.	Golongan III/c	2	1	3
6.	Golongan III/b	3	-	3
7.	Golongan III/a	3	2	5
8.	Golongan II/d	2	-	2
9.	Golongan II/c	-	1	2
10.	Golongan II/b	1	-	1
11.	Golongan II/a	-	-	-
12.	Golongan I/d	-	-	-
	Jumlah	16	6	22

#### 4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian LKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Balangan, ini terdiri dari 4 BAB, yaitu:

##### BAB I. PENDAHULUAN:

Pada bagian ini dijelaskan Informasi Umum tentang latar belakang, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Sistematika Penyusunan.

##### BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan Gambaran Singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

##### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini, Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan, Analisis penggunaan sumber daya dan analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta realisasi anggaran.

##### BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 1. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

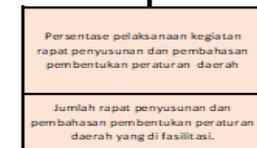
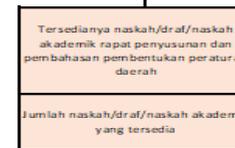
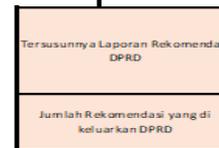
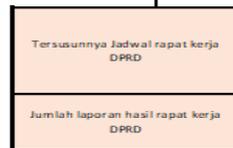
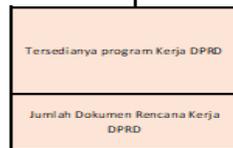
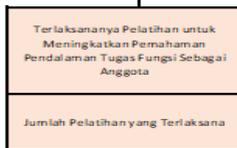
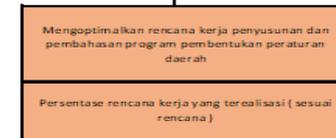
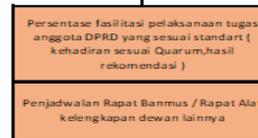
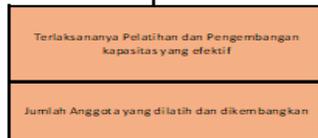
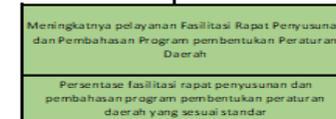
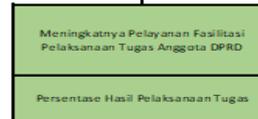
Tujuan umum disusunnya Penetapan Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program- program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang di hadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan IKU Pemerintah Kabupaten Balangan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023. Target Kinerja pada tingkat saasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mencapainya dalam Tahun 2023.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 dimaksud disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revisi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan dan Kepala Bagian serta pejabat JF maupun pelaksana telah menyesuaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 telah di susun berdasarkan pohon kinerja yang telah di tetapkan berdasarkan hasil evaluasi menpan RB seperti pada Tabel berikut:

**POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD**



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIS DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.TAMRIN,S.Ag,SE,M.AP  
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom  
Jabatan : BUPATI BALANGAN  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Paringin, 10 Januari 2023

Pihak Pertama,

  
H.TAMRIN,S.Ag,SE,M.AP  
NIP. 19731224 199403 1 007

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIS DPRD KAB.BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	- Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD  - Peningkatan Nilai SAKIP	70 IKM  73 Nilai

No Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp.32.164.464.426,-	APBD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.15.309.211.900,-	APBD
Total	Rp.47.473.676.326,-	APBD



Pihak Kedua

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Paringin, 10 Januari 2023

Pihak Pertama,

  
H. TAMRIN, S.Ag, SE, M. AP  
NIP. 19731224 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.TAMRIN,S.Ag,SE,M.AP  
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom  
Jabatan : BUPATI BALANGAN  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, September 2023

Pihak Kedua

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pihak Pertama,

H.TAMRIN,S.Ag,SE,M.AP  
NIP. 19731224 199403 1 007

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA  
PERUBAHAN TAHUN 2023  
SEKRETARIS DPRD KAB.BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

NO (1)	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) (2)	INDIKATOR KINERJA (3),	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	- IKM Pelayanan kepada semua anggota Dewan	84,88

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp.33.111.314.776,-	APBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 27.533.047.700,-	APBD
	Total	Rp.62.644.362.476,-	APBD

Paringin, September 2023

Pihak Kedua



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pihak Pertama,



H.TAMRIN,S.Ag,SE,M.AP  
NIP. 19731224 199403 1 007

## RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Revisi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah di sesuaikan dengan cashcading revisi hasil dari evaluasi Menpan RB.

### a. VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Rumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan yaitu:

#### **”Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD “**

Maksud Visi tersebut sebagai berikut :

Visi ini mencerminkan upaya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan perubahan yang lebih baik lagi , sehingga mampu mengoptimalkan peran *public relation*-nya untuk menciptakan pelayanan yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- Mendorong tercapainya produk hukum DPRD yang berkualitas;
- Menyediakan sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran tugas;
- Menyempurnakan uraian tugas dan pedoman kerja;
- Mengelola dokumen, informasi dan risalah sidang DPRD;
- Mengemban hubungan harmonis antara Legislatif dan Eksekutif agar produktif;

## **b. Tujuan**

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Tercapainya produk hukum yang berkualitas dan berpihak pada rakyat
2. Tercapainya pelayanan yang lebih optimal
3. Peningkatan kinerja dan etos kerja karyawan
4. Menyediakan referensi, informasi data yang lebih lengkap dan akurat
5. Menciptakan suasana kondusif antara legislative dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan

## **c. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah:

*“ Meningkatkan kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD “*

## **d. Strategi dan arah kebijakan**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Program Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

## Keterkaitan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran

Visi : Membangun desa menata Kota menuju Balangan yang lebih baik,maju dan sejahtera

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU
Ke Empat " Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintah Sebagai Abdi Masyarakat "	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas layanan Sekretariat DPRD	Indek Kepuasan Masyarakat Kepada Semua Anggota DPRD

## 2.PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATENBALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023 pada dasarnya pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Rencana kinerja tahunan tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023.

sebagai mana penetapan kinerja tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan telah membuat penetapan kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023, namun dalam penyusunan LKIP tahun 2023, sasaran yang akan dianalisis adalah sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis yang merupakan Gambaran Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang sebenarnya, adapun secara rinci Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat dilihat dalam Lampiran.

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir RPJMD	Keterangan
			2021	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			4	5			6	7	8	9	10	11		
1	Meningkatkan pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	65	70	72	74	75		Lama
	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	IKM Pelayanan kepada semua anggota Dewan	Baik	Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	IKM Pelayanan kepada semua anggota Dewan	Sangat Baik	84,88	84,98	84,98	85,18	85,50	85,50	Revisi sesuai cashcading
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai SAKIP )	Baik	Sangat Baik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai SAKIP )	Baik	65	70	72	74	75	78,20	Revisi Sesua Renja 2024 di SIPD RI
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai SAKIP )	Baik	Sangat Baik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai SAKIP )	63,15 Baik	71,20 Predikat BB					Predikat BB Predikat BB	Realisasi

## BAB III

### KINERJA INSTANSI

Kinerja Instansi adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah berorientasi pada hasil atau outcome bukan berorientasi pada anggaran (input) atau kegiatan (output). Pada umumnya instansi pemerintah bekerja berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. Banyak instansi pemerintah yang mengklaim keberhasilannya semata-mata berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran yang diserap atau banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan dianggap berhasil dilaksanakan jika mampu menyerap anggaran lebih dari 95% atau pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana selesai 100% tanpa mengaitkan dengan manfaat yang seharusnya diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya.

Pola pikir kemudian berubah dimana instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian dan melaporkan kinerjanya secara periodik. Sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan serta hasil (outcome) yang dicapai dan selama tahun 2023.

Sekretariat DPRD melaksanakan 2 (dua) Program yang di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD Balangan sebagai wujud penerapan PMd 90 tahun 2019 dan Pemutakhiran Kepmen 050-5889 tahun 2023 ada beberapa sub kegiatan yang menyesuaikan Maapingnya dari perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri yang berlaku sebelumnya.

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis yang disajikan dalam LKIP ini lebih fokus pada realisasi sasaran. Secara umum kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran.

Hal ini dapat terlihat dari dibawah ini :

Tabel TC - 25									
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatnya Nila SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	65	70	72	74	75	75
				Realisasi Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				63,15	71,20				

Dari hasil LHE 2022 tentu masih banyak yang perlu di perbaiki dan di tindak lanjuti sesuai arahan Tim evaluator AKIP SKPD seperti dalam tindak lanjut LHE berikut ini ; ( SOP dalam Lampiran )

**TINDAK LANJUT PERBAIKAN ATAS EVALUASI SAKIP TAHUN 2022  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN**

NO	HASIL REKOMENDASI	TINDAK LANJUT / TANGGAPAN
1	<p><b>Perencanaan Kinerja :</b> Agar Menyusun dan Menetapkan SOP pedoman teknis perencanaan kinerja. Agar terdapat IKU di dalam dokumen Rencana sehingga pencapaian IKU baik diurutkan selama 1 Periode RPJMD atau Rencana ( 5 tahun ), IKU harus sesuai dengan target kinerja yang akan di capai. Agar target minimal yang ditetapkan pada rencana sesuai dengan Rencana Target provinsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional ( RPJMN )</p>	<p><b>Perencanaan Kinerja :</b> Telah menyusun dan menetapkan SOP pedoman teknis perencanaan kinerja. Alasan Mampu baik Rencana Sesuai arahan pada Rencana Perubahan. Alasan menyelaraskan target target sesuai dengan target rencana perubahan sesuai arahan.</p>
2	<p><b>Pengukuran Kinerja :</b> Menyusun dan Menetapkan SOP pedoman teknis pengukuran kinerja. Agar terdapat penjelasan di setiap indikator cara mengukur indikator kinerja pada rencana kerja SKPD Agar pengukuran kinerja menjadi dasar uraian pencapaian ( pemberian / pengurangan ) tunjangan kinerja / penghasilan Agar pengukuran kinerja menjadi dasar uraian pencapaian / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.</p>	<p><b>Pengukuran Kinerja :</b> Telah di susun dan ditetapkan SOP pengukuran kinerja. Alasan membuat penjelasan cara pengukuran indikator kinerja pada rencana kerja SKPD Telah mengevaluasi laporan kinerja terhadap penilaian pemberian tunjangan TPP ASN setiap bulannya. Telah mengevaluasi kinerja dan Angka di Sekretariat DPRD</p>
3	<p><b>Laporan Kinerja :</b> Agar dokumen Laporan Kinerja ( LKJP ) disusun secara berkala sesuai dengan standar dan mengintegrasikan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja diantaranya informasi kewangan, anggaran ( target dan realisasi ) masing-masing unsur / indikator kinerja sesuai PK seluruh pegawai ) Informasi secara jelas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan biaya kinerja organisasi pada pegawai secara implisit dan eksplisit seperti seluruh target kinerja mencapai 100 % sebagai wujud komitmen; adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan komitmen; serta upaya pengurangan atau pemotongan pada pegawai ; selalu memberikan rekomendasi jika terdapat kendala/ hambatan sebagai wujud kepedulian dan inovasi / adaptif.</p>	<p><b>Laporan Kinerja :</b> Alasan memperbaiki penyusunan laporan kinerja lebih berkualitas sesuai arahan. Informasi dalam laporan kinerja sudah dijadikan dasar untuk memberikan reward dan punishment</p>
4	<p><b>Evaluasi Internal :</b> Agar membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah di nilai / di formalikan. Evaluasi dilakukan dengan dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada rencana aksi, sehingga evaluasi dilaksanakan triwulan. Agar rekomendasi perbaikan atau faktor hambatan pada monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan adanya peningkatan realisasi target pada monitoring dan evaluasi triwulan berikutnya. Agar rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya ditindaklanjuti oleh SKPD dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya. Agar mengajukan permintaan revisi Laporan Kinerja ( LKJP ) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektori Daerah ( APIP ) sebelumnya dilakukan evaluasi SAKIP dan Revu LPPD .</p>	<p><b>Evaluasi Internal :</b> Telah meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal dan dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala untuk dapat melaksanakan rencana aksi terhadap kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaannya Alasan membuat rekomendasi dari hasil evaluasi Alasan meningkatkan nilai Evaluasi AKIP Alasan mengajukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja sesuai arahan.</p>
5	<p><b>Pencapaian Sasaran Kinerja :</b></p>	<p><b>Pencapaian Sasaran Kinerja :</b></p>

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Balangan

H TAMARIN, S. Ag. SE. MAP  
NIP. 197012241994001007

Sebagai perwujudan dan implementasi perbaikan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Balangan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, ada 6 ( enam ) unsur penilaian IKM di Sekretariat DPRD Balangan yang di kumpulkan untuk dapat diambil nilai unsur penilaian rata- rata sesuai kategori penilaian pelayanan sebagai berikut:

Interval Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
I	81 - 100	Sangat Puas
II	61 - 80	Puas
III	41 - 60	Cukup Puas
IV	21 - 40	Kurang Puas
V	0 - 20	Kurang Puas

Berikut progress capaian IKM yang di capai oleh Sekretariat DPRD :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkat Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	IKM Pelayanan kepada semua anggota Dewan	IKM 65	IKM 70	IKM 84,88	IKM 84,98	IKM 85,18	IKM 85,50
				Realisasi Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Nilai IKM 68,42	Nilai IKM 84,88	Nilai IKM 84,98			

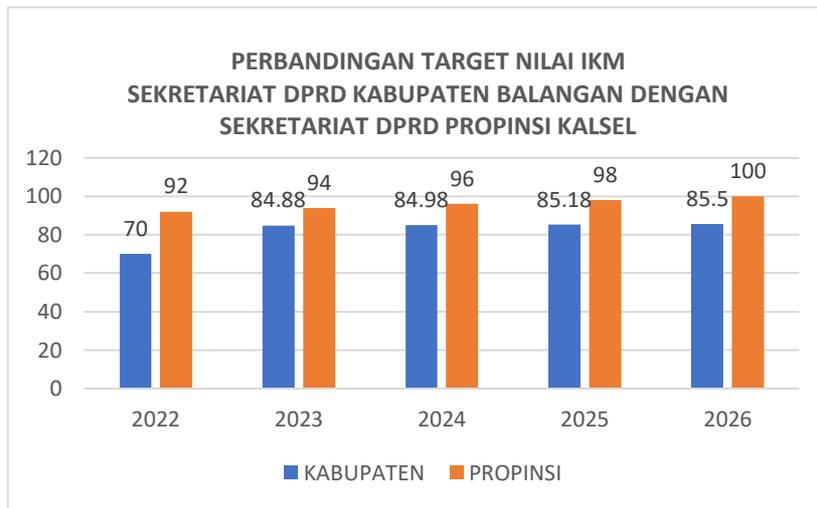
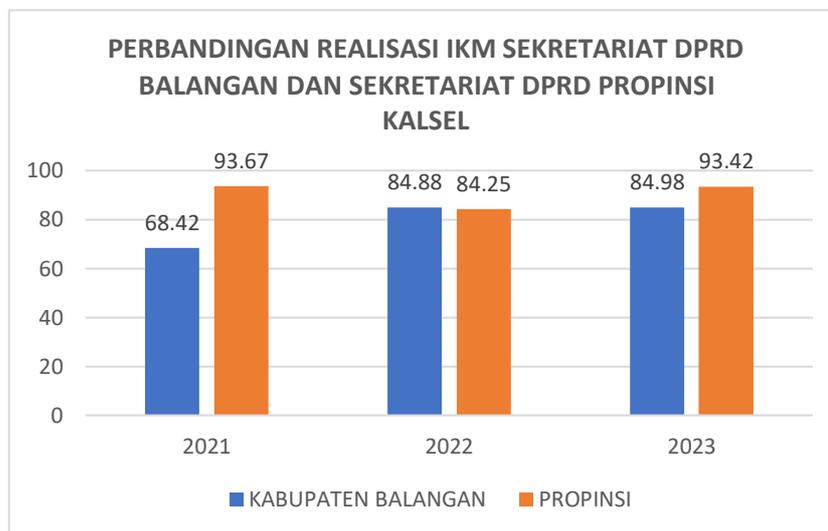


Diagram 3.1



Indikator kinerja utama dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Balangan ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 tahun 2008 tersebut disusun dengan mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Indikator kinerja utama ini juga menggambarkan Dua program utama yang difokuskan pada ;

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2022	TARGET IKU 2023	REALISASI TAHUN 2023	TARGET IKU 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET IKU 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET IKU 2026	REALISASI TAHUN 2026
1	IKM Pelayanan kepada semua anggota Dewan	85,50	84,88	84,88	84,98	84,98		85,18		85,50	

Capaian IKU di dukung oleh enam ( 6 ) unsur pelayanan yang ada di Sekretariat DPRD  
Seperti terlihat pada Perhitungan jumlah IKM ini meliputi penilaian pada kegiatan:

- (1) Kajian dan Perundang-undangan
- (2) Bagian Fasilitasi Penganggaran
- (3) Bagian Risalah , persidangan dan Publikasi
- (4) Bagian Umum Rumah Tangga
- (5) Fasilitasi Pengawasan
- (6) Bagian Program dan Keuangan

Tabel Layanan dapat di lihat di bawah ini :

a. Layanan Perundang-undangan

No Urut	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	NILAI AKTUAL KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PERUNDANG-UNDANGAN									Layanan
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	Laki-Laki	58	S1	Pimpinan DPRD	4	4	4	4	4	3	4	3	3	Perundang-undangan
2	Laki-Laki	36	S1	Pimpinan DPRD	4	4	4	4	4	3	3	3	3	Perundang-undangan
3	Laki-Laki	27	SLTA	Pimpinan DPRD	4	4	4	4	4	3	3	3	3	Perundang-undangan
4	Laki-Laki	31	S2	Anggota	4	4	4	4	4	3	4	3	3	Perundang-undangan
5	Perempuan	48	SLTA	Anggota	4	4	4	4	4	3	4	3	3	Perundang-undangan
6	Laki-Laki	45	S2	Anggota	4	4	4	4	4	3	4	3	4	Perundang-undangan
7	Perempuan	36	S1	Anggota	4	4	4	4	4	3	4	3	4	Perundang-undangan
8	Laki-Laki	52	S2	Anggota	4	4	3	4	4	3	4	3	4	Perundang-undangan
9	Laki-Laki	36	S2	Anggota	4	4	3	4	3	3	4	3	4	Perundang-undangan
10	Laki-Laki	37	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	4	4	3	4	Perundang-undangan
11	perempuan	40	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	4	4	3	4	Perundang-undangan
12	Laki-Laki	46	S1	Anggota	4	3	3	3	3	4	4	3	3	Perundang-undangan
13	Laki-Laki	54	S1	Anggota	4	4	3	3	3	4	3	3	3	Perundang-undangan
14	Perempuan	58	S1	Anggota	4	4	3	3	3	3	4	3	3	Perundang-undangan
15	Perempuan	27	S1	Anggota	4	4	3	4	3	4	4	3	3	Perundang-undangan
16	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	4	3	4	3	4	4	3	3	Perundang-undangan
17	Laki-Laki	25	S1	Anggota	4	4	3	4	3	4	3	3	3	Perundang-undangan
18	Laki-Laki	45	S1	Anggota	4	4	3	4	3	4	3	3	3	Perundang-undangan
19	Laki-Laki	40	S1	Anggota	4	4	3	3	3	4	3	3	3	Perundang-undangan
20	Laki-Laki	50	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	4	3	3	3	Perundang-undangan
21	Laki-Laki	51	SLTA	Anggota	4	4	3	3	4	4	3	4	3	Perundang-undangan
22	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	4	3	3	3	3	4	4	3	Perundang-undangan
23	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	4	3	4	4	4	4	4	3	Perundang-undangan
24	Laki-Laki	47	SLTA	Anggota	4	4	3	3	4	4	4	4	4	Perundang-undangan
25	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	4	3	4	3	4	3	4	4	Perundang-undangan
Jumlah Nilai Per Unsour					100	99	82	90	87	88	91	80	83	
Nilai Rata-Rata					4.00	3.98	3.28	3.60	3.48	3.66	3.84	3.20	3.32	
Nilai Rata-Rata Tertimbang					0.44	0.44	0.38	0.40	0.38	0.38	0.40	0.36	0.37	3.52
<b>SKM UNIT PELAYANAN</b>					25		x	3.52		88.00				

No	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		NRK*	Indeks Konverdit**	Mutu
U1	Penyantapan	4.00	100.00	A
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.96	99.00	A
U3	Waktu Pelayanan	3.28	82.00	B
U4	Biaya / Tarif	3.60	90.00	A
U5	Produk/Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.48	87.00	B
U6	Kompetensi Pelaksana	3.66	91.50	A
U7	Peralatan Pelaksana	3.20	80.00	B
U8	Pengantaran Pengaduan, Saran dan	3.20	80.00	B
U9	Sarana dan Prasarana	3.32	83.00	B

TABEL NILAI INTERVAL (NI)

Nilai	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konverdit (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
5	3,0000-3,9999	91,00-100,00	D	Tidak Baik
4	2,0000-3,0000	65,00-90,00	C	Kurang Baik
3	1,0000-1,9999	40,00-64,00	B	Baik
2	0,5000-0,9999	20,00-39,00	A	Sangat Baik

b. Layanan Fasilitasi Anggaran

No Urut	Jenis Kelamin	Usia	pendidikan	Pekerjaan	NILAI AKTUAL KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN FASILITASI ANGGARAN									Layanan
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	Laki-Laki	58	S1	Pimpinan DPRD	4	3	3	4	3	3	3	3	2	Fasilitasi Anggaran
2	Laki-Laki	36	S1	Pimpinan DPRD	4	3	3	4	4	4	3	3	2	Fasilitasi Anggaran
3	Laki-Laki	27	SLTA	Pimpinan DPRD	4	3	3	4	4	3	4	4	2	Fasilitasi Anggaran
4	Laki-Laki	31	S2	Anggota	4	3	3	4	4	4	3	4	2	Fasilitasi Anggaran
5	Perempuan	48	SLTA	Anggota	4	3	3	3	4	4	4	4	2	Fasilitasi Anggaran
6	Laki-Laki	45	S2	Anggota	4	3	3	3	4	4	4	4	4	Fasilitasi Anggaran
7	Perempuan	36	S1	Anggota	4	3	3	3	4	4	4	4	4	Fasilitasi Anggaran
8	Laki-Laki	52	S2	Anggota	4	3	3	3	4	4	3	4	4	Fasilitasi Anggaran
9	Laki-Laki	36	S2	Anggota	4	3	3	3	3	3	3	4	4	Fasilitasi Anggaran
10	Laki-Laki	37	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	3	3	4	3	Fasilitasi Anggaran
11	perempuan	40	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	4	4	4	3	Fasilitasi Anggaran
12	Laki-Laki	46	S1	Anggota	4	4	3	4	3	4	4	4	3	Fasilitasi Anggaran
13	Laki-Laki	54	S1	Anggota	4	4	3	4	4	4	4	4	3	Fasilitasi Anggaran
14	Perempuan	58	S1	Anggota	4	4	3	4	3	3	4	4	3	Fasilitasi Anggaran
15	Perempuan	27	S1	Anggota	4	3	3	4	3	4	4	4	3	Fasilitasi Anggaran
16	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	3	3	4	3	3	3	4	4	Fasilitasi Anggaran
17	Laki-Laki	25	S1	Anggota	4	3	3	4	2	4	3	4	4	Fasilitasi Anggaran
18	Laki-Laki	45	S1	Anggota	4	3	3	3	2	4	3	4	4	Fasilitasi Anggaran
19	Laki-Laki	40	S1	Anggota	4	3	3	3	4	3	2	4	4	Fasilitasi Anggaran
20	Laki-Laki	50	SLTA	Anggota	4	3	3	3	4	3	2	4	4	Fasilitasi Anggaran
21	Laki-Laki	51	SLTA	Anggota	4	3	3	3	4	3	3	4	4	Fasilitasi Anggaran
22	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	3	3	3	4	3	3	4	4	Fasilitasi Anggaran
23	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	2	3	4	3	3	3	4	4	Fasilitasi Anggaran
24	Laki-Laki	47	SLTA	Anggota	4	2	3	4	0	3	3	4	4	Fasilitasi Anggaran
25	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	3	3	4	0	3	3	3	4	Fasilitasi Anggaran
Jlh Nilai Per Unsor					100	75	76	88	79	87	82	97	84	
Nilai Rata-Rata					4.00	3.12	3.00	3.62	3.18	3.48	3.28	3.88	3.36	
Nilai Rata-Rata Tertimbang					0.44	0.34	0.38	0.39	0.36	0.38	0.36	0.43	0.37	3.39
<b>SKM UNIT PELAYANAN</b>							<b>25</b>	<b>x</b>			<b>3.39</b>			<b>84.7</b>

No	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		NR*	Indeks Konvergen**	Mutu
U1	Pelayanan	6.00	100.00	A
U2	Saluran, Mekanisme dan Prosedur	3.12	78.00	B
U3	Waktu Pelayanan	3.00	75.00	C
U4	Biaya / Tarif	3.52	88.00	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.16	79.00	B
U6	Kompetensi Pelaksana	3.48	87.00	B
U7	Peralatan Pelaksana	3.28	82.00	B
U8	Pengorganisasian, Saran dan	3.88	97.00	B
U9	Sarana dan Prasarana	3.36	84.00	B

Nilai	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konvergen (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,0000-1,1999	75,00-84,99	D	Tidak Baik
2	1,2000-1,3999	65,00-74,99	C	Kurang Baik
3	1,4000-1,5999	75,51-83,30	B	Baik
4	1,6000-1,9999	88,31-100,0	A	Sangat Baik

c. Layanan Risalah dan Pelaporan

No Urut	Jenis Kelamin	Usia	Jendral	Pekerjaan	NILAI AKTUAL KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN RISALAH DAN PELAPORAN									Layanan	
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Laki-Laki	58	S1	Pimpinan DPRD	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Risalah dan Pelaporan
2	Laki-Laki	36	S1	Pimpinan DPRD	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	Risalah dan Pelaporan
3	Laki-Laki	27	SLTA	Pimpinan DPRD	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	Risalah dan Pelaporan
4	Laki-Laki	31	S2	Anggota	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	Risalah dan Pelaporan
5	Perempuan	48	SLTA	Anggota	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Risalah dan Pelaporan
6	Laki-Laki	45	S2	Anggota	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	Risalah dan Pelaporan
7	Perempuan	36	S1	Anggota	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	Risalah dan Pelaporan
8	Laki-Laki	52	S2	Anggota	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
9	Laki-Laki	36	S2	Anggota	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
10	Laki-Laki	37	SLTA	Anggota	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
11	perempuan	40	SLTA	Anggota	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
12	Laki-Laki	46	S1	Anggota	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
13	Laki-Laki	54	S1	Anggota	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
14	Perempuan	58	S1	Anggota	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
15	Perempuan	27	S1	Anggota	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
16	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
17	Laki-Laki	25	S1	Anggota	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
18	Laki-Laki	45	S1	Anggota	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
19	Laki-Laki	40	S1	Anggota	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
20	Laki-Laki	50	SLTA	Anggota	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
21	Laki-Laki	51	SLTA	Anggota	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
22	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
23	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
24	Laki-Laki	47	SLTA	Anggota	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
25	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Risalah dan Pelaporan
Jlh Nilai Per Unsur					100	82	86	82	86	87	86	81	82		
Nilai Rata-Rata					4.00	3.28	3.40	3.28	3.40	3.48	3.40	3.24	3.28		
Nilai Rata-Rata Tertimbang					0.44	0.58	0.57	0.38	0.57	0.58	0.57	0.58	0.58	3.38	
<b>SKM UNIT PELAYANAN</b>					25		X	3.38		84.59					

No	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		NRP*	Indeks Konversi**	Mutu
U1	Pelayanan	4.00	100.00	A
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.28	82.00	B
U3	Waktu Pelayanan	3.80	95.00	B
U4	Biaya / Tarif	3.28	82.00	B
U5	Produk/Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.80	95.00	B
U6	Kompetensi Petalaksana	3.48	87.00	B
U7	Peralata/Pelaksanaan	3.80	95.00	B
U8	Pemangatan/Pengadaan, Saran dan	3.24	81.00	B
U9	Sarana dan Prasarana	3.28	82.00	B

Nilai	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1.0000-2.2999	25.00-41.66	D	Tidak Baik
2	2.3000-3.0999	42.00-75.00	C	Kurang Baik
3	3.1000-4.3999	76.00-83.33	B	Baik
4	4.4000-5.0000	84.00-100.00	A	Sangat Baik

d.Layanan Umum dan Rumah Tangga

No Urut	Jenis Kelamin	Usia	Penduduk	Pekerjaan	NILAI AKTUAL KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN RUMAH TANGGA									Jumlah	
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Laki-Laki	58	S1	Pimpian DPRD	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	Rumah Tangga
2	Laki-Laki	36	S1	Pimpian DPRD	4	3	4	4	4	4	3	3	3	Rumah Tangga	
3	Laki-Laki	27	SLTA	Pimpian DPRD	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Rumah Tangga	
4	Laki-Laki	31	S2	Anggota	4	3	4	4	4	3	4	3	3	Rumah Tangga	
5	Perempuan	48	SLTA	Anggota	4	4	4	3	4	4	4	3	3	Rumah Tangga	
6	Laki-Laki	45	S2	Anggota	4	3	3	4	4	3	4	3	3	Rumah Tangga	
7	Perempuan	36	S1	Anggota	4	3	3	3	3	4	4	3	3	Rumah Tangga	
8	Laki-Laki	52	S2	Anggota	4	3	4	3	3	3	3	3	3	Rumah Tangga	
9	Laki-Laki	36	S2	Anggota	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Rumah Tangga	
10	Laki-Laki	37	SLTA	Anggota	4	3	4	3	3	4	4	3	3	Rumah Tangga	
11	perempuan	40	SLTA	Anggota	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Rumah Tangga	
12	Laki-Laki	46	S1	Anggota	4	3	3	3	3	3	3	4	3	Rumah Tangga	
13	Laki-Laki	54	S1	Anggota	4	4	4	3	3	3	4	4	3	Rumah Tangga	
14	Perempuan	56	S1	Anggota	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Rumah Tangga	
15	Perempuan	27	S1	Anggota	4	4	4	3	3	3	4	4	3	Rumah Tangga	
16	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	4	4	4	3	3	3	4	3	Rumah Tangga	
17	Laki-Laki	26	S1	Anggota	4	4	3	4	3	3	4	4	3	Rumah Tangga	
18	Laki-Laki	45	S1	Anggota	4	3	4	4	3	3	4	3	3	Rumah Tangga	
19	Laki-Laki	40	S1	Anggota	4	4	4	3	3	3	4	3	3	Rumah Tangga	
20	Laki-Laki	50	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	3	3	3	3	Rumah Tangga	
21	Laki-Laki	51	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	3	3	3	3	Rumah Tangga	
22	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Rumah Tangga	
23	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Rumah Tangga	
24	Laki-Laki	47	SLTA	Anggota	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Rumah Tangga	
25	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	4	3	3	4	3	4	3	3	Rumah Tangga	
Jth Nilai Per Unsur					100	87	86	82	88	80	80	82	76		
Nilai Rata-Rata					4.00	3.48	3.40	3.28	3.52	3.20	3.80	3.28	3.00		
Nilai Rata-Rata Tertimbang					0.44	0.88	0.87	0.36	0.87	0.35	0.40	0.88	0.33	3.36	
<b>SKM UNIT PELAYANAN</b>					25		x	3.36			8404				

No	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		NR*	Indeks Konvensional**	Mutu
U1	Penyediaan	100	100.00	A
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.68	87.00	B
U3	Waktu Pelayanan	1.80	85.00	B
U4	Biaya/Tarif	1.28	82.00	B
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1.32	83.00	B
U6	Komponen/ Pelaksana	1.20	80.00	B
U7	Perilaku Pelaksana	1.00	80.00	A
U8	Pengantaran Pengaduan, Saran dan	1.28	82.00	B
U9	Sarana dan Prasarana	1.00	75.00	B

Nilai	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konvensional (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,0000-3,3333	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	3,3333-3,6666	65,00-75,00	C	Kurang Baik
3	3,6666-3,5120	75,01-88,30	B	Baik
4	3,5120-4,0000	88,31-100,0	A	Sangat Baik

e. Layanan Fasilitasi Pengawasan

No Urut	Jenis Kelamin	Usia	Penduduk	Pekerjaan	NILAI AKTUAL KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN FASILITASI PENGAWASAN									Jumlah	
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Laki-Laki	58	S1	Pmpinan DPRD	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	Facilitasi Pengawasan
2	Laki-Laki	36	S1	Pmpinan DPRD	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	Facilitasi Pengawasan
3	Laki-Laki	27	SLTA	Pmpinan DPRD	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	Facilitasi Pengawasan
4	Laki-Laki	31	S2	Anggota	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	Facilitasi Pengawasan
5	Perempuan	48	SLTA	Anggota	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	Facilitasi Pengawasan
6	Laki-Laki	45	S2	Anggota	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	Facilitasi Pengawasan
7	Perempuan	36	S1	Anggota	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	Facilitasi Pengawasan
8	Laki-Laki	52	S2	Anggota	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	Facilitasi Pengawasan
9	Laki-Laki	36	S2	Anggota	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	Facilitasi Pengawasan
10	Laki-Laki	37	SLTA	Anggota	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Facilitasi Pengawasan
11	perempuan	40	SLTA	Anggota	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Facilitasi Pengawasan
12	Laki-Laki	46	S1	Anggota	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Facilitasi Pengawasan
13	Laki-Laki	54	S1	Anggota	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	Facilitasi Pengawasan
14	Perempuan	58	S1	Anggota	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Facilitasi Pengawasan
15	Perempuan	27	S1	Anggota	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	Facilitasi Pengawasan
16	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Facilitasi Pengawasan
17	Laki-Laki	25	S1	Anggota	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Facilitasi Pengawasan
18	Laki-Laki	45	S1	Anggota	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Facilitasi Pengawasan
19	Laki-Laki	40	S1	Anggota	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	Facilitasi Pengawasan
20	Laki-Laki	50	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Facilitasi Pengawasan
21	Laki-Laki	51	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Facilitasi Pengawasan
22	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Facilitasi Pengawasan
23	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	Facilitasi Pengawasan
24	Laki-Laki	47	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	Facilitasi Pengawasan
25	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	Facilitasi Pengawasan
Jth Nilai Per Unsur					100	90	88	81	82	78	90	91	90		
Nilai Rata-Rata					4,00	3,80	3,62	3,24	3,28	3,04	3,80	3,64	3,20		
Nilai Rata-Rata Tertimbang					0,44	0,40	0,39	0,38	0,38	0,33	0,40	0,40	0,36		3,42
<b>SKM UNIT PELAYANAN</b>					<b>25 X 3,42</b>									<b>85,58</b>	

No	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		NRK*	Indeks Konversi**	Mutu
U1	Persyaratan	4,00	100,00	A
U2	Costum, Melaksanakan dan Prosedur	3,00	90,00	A
U3	Waktu Pelayanan	3,50	88,00	A
U4	Biaya / Tarif	3,20	81,00	B
U5	Produk/Spesifikasi Jasa/Pelayanan	3,20	82,00	B
U6	Kompetensi/Praktikernya	3,00	75,00	B
U7	Pertukuk Pelayanan	3,00	90,00	A
U8	Pemangangan/Pengawasan, Saran dan	3,50	91,00	A
U9	Sarana dan Prasarana	3,20	80,00	B

Nilai	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kategori Pelayanan
1	0,000-0,3999	01,000-1,99	D	Tidak Baik
2	0,400-0,6999	05,00-15,00	C	Kurang Baik
3	0,700-1,1999	15,01-30,00	B	Baik
4	1,200-4,0000	30,01-100,0	A	Sangat Baik

f. Layanan keuangan

No Urut	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pelayanan	NILAI AKTUAL KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN KEUANGAN									Jumlah
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	Laki-Laki	58	S1	Rimpinan DPRD	4	4	4	3	4	3	4	4	3	Keuangan
2	Laki-Laki	36	S1	Rimpinan DPRD	4	4	4	3	4	3	4	4	3	Keuangan
3	Laki-Laki	27	SLTA	Rimpinan DPRD	4	4	4	3	4	3	4	4	3	Keuangan
4	Laki-Laki	31	S2	Anggota	4	4	4	4	3	3	4	4	3	Keuangan
5	Perempuan	48	SLTA	Anggota	4	4	4	4	3	3	4	4	4	Keuangan
6	Laki-Laki	45	S2	Anggota	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Keuangan
7	Perempuan	36	S1	Anggota	4	4	4	4	3	3	3	4	3	Keuangan
8	Laki-Laki	52	S2	Anggota	4	4	4	4	3	3	4	4	3	Keuangan
9	Laki-Laki	36	S2	Anggota	4	4	4	4	3	3	4	3	3	Keuangan
10	Laki-Laki	37	SLTA	Anggota	4	3	4	3	3	3	4	3	3	Keuangan
11	perempuan	40	SLTA	Anggota	4	3	4	3	3	3	4	3	3	Keuangan
12	Laki-Laki	46	S1	Anggota	4	3	4	3	3	3	3	3	3	Keuangan
13	Laki-Laki	54	S1	Anggota	4	3	4	3	4	3	3	3	3	Keuangan
14	Perempuan	58	S1	Anggota	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Keuangan
15	Perempuan	27	S1	Anggota	4	3	3	3	4	3	4	3	3	Keuangan
16	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	3	3	3	3	4	4	3	3	Keuangan
17	Laki-Laki	26	S1	Anggota	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Keuangan
18	Laki-Laki	45	S1	Anggota	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Keuangan
19	Laki-Laki	40	S1	Anggota	4	4	3	3	3	3	4	4	3	Keuangan
20	Laki-Laki	50	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	3	3	4	3	Keuangan
21	Laki-Laki	51	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	3	3	4	3	Keuangan
22	Laki-Laki	50	S1	Anggota	4	4	3	3	3	3	3	4	3	Keuangan
23	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	3	4	4	4	Keuangan
24	Laki-Laki	47	SLTA	Anggota	4	4	3	3	3	3	4	4	4	Keuangan
25	Laki-Laki	55	SLTA	Anggota	4	3	3	3	4	3	3	4	4	Keuangan
Jth Nilai Per Unsur					100	80	88	81	82	78	80	81	80	
Nilai Rata-Rata					4.00	3.80	3.62	3.24	3.28	3.04	3.80	3.84	3.20	
Nilai Rata-Rata Tertimbang					0.44	0.40	0.38	0.38	0.38	0.33	0.40	0.40	0.35	3.42
<b>SKM UNIT PELAYANAN</b>					25		x	3.42		8558				

No	UNSUR PELAYANAN	ARTU AL MASYARAKAT		
		NRB*	Indeks Konver**	Mutu
U1	Penyayanan	4.00	100.00	A
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.60	90.00	A
U3	Waktu Pelayanan	3.52	88.00	A
U4	Biaya / Tarif	3.24	81.00	B
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.28	82.00	B
U6	Kompetensi Pelaksana	3.04	76.00	B
U7	Pertindak Pelaksana	3.60	90.00	A
U8	Peningkatan Pengabdian, Saran dan	3.68	91.00	A
U9	Sarana dan Prasarana	3.20	80.00	B

Nilai	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konvensional (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
3	3,0000-3,0000	25,00-50,00	D	Tidak Baik
3	3,0000-3,0540	51,00-75,00	C	Kurang Baik
3	3,0544-3,5320	76,01-89,00	B	Baik
4	3,5324-4,0000	89,01-100,0	A	Sangat Baik

Total Anggaran Per Program dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 35.108.214.776,-	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 27.536.147.700,-	APBD
	<b>Jumlah Anggaran Tahun 2023</b>	<b>Rp. 62.644.362.476,-</b>	<b>APBD</b>

Perbandingan Target dan capaian IKM di Sekretariat DPRD Kabupaten Lain regional Banjarmasin :

## PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan memiliki 2 ( Dua ) sasaran strategis dan 2 (dua ) program yang harus dilaksanakan dengan 2 (Dua ) indikator kinerja utama dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD. Dari 2 ( dua ) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja sekretariat DPRD kabupaten Balangan dapat diikhtisarkan bahwa 2 ( dua ) indikator kinerja utama telah mencapai target akhir Renstra , yaitu sebagai berikut:

### II. Pengukuran kinerja Eselon II/Sekretaris Dewan

**Tabel II. Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Sekretaris DPRD**

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya Kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	84,84 IKM	84,98	101 %	A
	Nilai SAKIP	75	71,20 *	95 %	BB

Dapat dilihat pada tabel diatas untuk pengukuran kinerja Utama yaitu meningkatnya tata kelola Sekretariat DPRD dengan Indikator Hasil Evaluasi Sakip pada tahun 2022 dibagi dari target akhir Renstra Sekretariat DPRD telah mencapai target akhir Renstra dengan predikat BB penilaian SAKIP di kategori BB akan tetapi jika di lihat dari tabel penilaian AKIP Sekretariat DPRD Tahun 2022 ada dua unsur penilaian yang mengalami penurunan dapat dilihat dari tabel ;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00	23,18	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	14,06	20,40
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11,41	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	1,42	18,25
5	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi		13,08	
Nilai Akuntabilitas Kinerja			63,15	71,20
			B	BB

Komponen Perencanaan kinerja dan Pelaporan kinerja yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan belum perencanaan kinerja belum sepenuhnya mempedomani perencanaan kinerja jangka Panjang, Laporan kinerja belum sepenuhnya di reviu secara berkala oleh kepala bagian sampai Kepala SKPD.

Kedepan akan terus berupaya memperbaiki komponen- komponen penilaian AKIP Sekretariat DPRD.

- **Pengukuran kinerja Eselon III**

### **1. Bagian Risalah, Persidangan dan Publikasi**

Bagian Risalah, Persidangan dan publikasi Sekretariat DPRD kabupaten Balangan mempunyai kegiatan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan , kegiatan rapat, membuat risalah serta humas, protokol dan publikasi.

Ada 3 ( tiga ) Kinerja utama Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- undangan dengan 3 ( tiga ) indikator, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.****Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kategori</b>
Meningkatkannya Pelayanan Fasilitasi Rapat Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	100 %	100 %	100 %	Sangat Puas
Meningkatkannya pelayanan Fasilitasi pelaksanaan tugas Anggota DPRD	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas	100 %	84 %	84 %	Sangat Puas
Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Anggota DPRD	Persentase hasil pengembangan kapasitas anggota DPRD	100 %	60 %	60 %	Cukup Puas

Dari tabel di atas dapat diketahui untuk sasaran kinerja utama dari kepala bagian persidangan dan Kajian perundang-undangan yaitu Meningkatnya pelayanan fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD dan Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Anggota DPRD.

Dari sub. bag. Kajian Perundang-undangan ada 20 Rancangan Perda yang diusulkan Pemerintah Daerah telah di bahas,finalisasi 13 Raperda 6 Raperda APBD telah Selesai total 20 Raperda telah selesai di bahas dengan capaian 100 %.

Raperda Inisiatif target ada 3 ( tiga ) naskah telah di fasilitasi dibahas dan masih tahap harmonisasi ke 3 buah raperdanya, akan berlanjut ke tahun 2024 secara capaian indikator pada kinerja utamanya persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang sesuai standar telah tercapai 100 % , dengan demikian capaian predikat kinerja telah tercapai 100 % .Dengan predikat kinerja sangat memuaskan merupakan peningkatan yang sangat baik dari tahun sebelumnya.

Hal ini merupakan wujud perbaikan rencana aksi dari tahun sebelumnya dengan perbaikan koordinasi intens serta telah menjadi komitmen Bersama dengan Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Balangan dalam menyelaraskan rencana kerja Propemperda untuk mencapai tujuan dari indikator Kegiatan dan sub kegiatan dari Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan tugas anggota DPRD dengan capaian kinerja 84 % predikat kinerja Sangat puas masih di nilai cukup membaik dari tahun sebelumnya , ada beberapa pelaksanaan rapat yang di jadwalkan ulang di karena kan belum Quorum sehingga capaian target belum tercapai maksimal hal ini terjadi banyak mautan politik yang tidak dapat di harmonisasikan sehingga perlu di jadwalkan Kembali agar fasilitasi rapat DPRD dapat terlaksana dan memenuhi standart.

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas DPRD tidak dapat terlaksana dengan maksimal hal ini di sebabkan rencana kerja DPRD yang berubah tidak sesuai dengan hasil rapat kerja anggaran perubahan tahun 2023.

Sehingga rencana kerja pelaksanaan bimtek Bersama yang semula akan di laksanakan di anggaran perubahan tidak terealisasi .Hal ini sangat mempengaruhi capaian target 2023 semula 100 % hanya dapat tercapai 60 % dengan predikat kinerja pelayanan Cukup Puas.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Fasilitasi Rapat Anggaran dan Pengawasan**

<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kategori</b>
Meningkatkannya pelayanan Fasilitasi pelaksanaan tugas Anggota DPRD	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas	100 %	84 %	84 %	Sangat Puas

### Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Umum dan Keuangan

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	71,20 *	71,20 *	100 %	BB

Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 tentu masih banyak yang perlu di perbaiki sesuai hasil rekomendasi Tim AKIP tahun 2022 yang telah tertuang dalam rencana aksi.

Tabel di bawah ini hasil LHE tahun 2022 Sekretariat DPRD Balangan yang terus berupaya melakukan perbaikan Akuntabilitas Kinerja dengan harapan hasil kinerja Sekretariat DPRD dapat mensupport Target Kinerja Kabupaten Balangan dalam Nilai SAKIP Kabupaten Balangan.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00	23,18	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	14,06	20,40
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11,41	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	1,42	18,25
5	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi		13,08	
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>63,15</b>	<b>71,20</b>
			<b>B</b>	<b>BB</b>

## Laporan Kurkin di Aplikasi E-Kino Triwulan IV 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target			Realisasi		Data Dukung Atas Realisasi Capaian Triwulan TW IV	Kendala Pencapaian Target Triwulan TW IV	Rencana Aksi	Catatan Efektif dan Efisien	Kinerja RPJMD yang di jawab		Catatan Evaluasi Kemenpan RB
			PK	Renstra	Renja	Triwulan TW IV	Kesesuaian Rumus Realisasi dan Rumus Dalam IKU					Menjelaskan Outcome / Keluaran IKU	Menjelaskan Kendala (6M)	
<b>SEKRETARIS DEWAN</b>														
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IV	Selaras	Peningkatan Nilai IKM	Masih Belum dapat maksimal memberikan pelayanan yang prima terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terus Berupaya berinovasi dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	62.644.362.476,- / 85,31 %	Peningkatan Nilai IKM	84,98 nilai IKM Semester II	Survei IKM di tahun depan di upayakan lebih maksimal dengan sudah di sediakan nya mesin survei pelayanan sesuai dengan PMDN no 17 tahun 2017, akan lebih mempermudah pengisian kusioner penilaian pelayanan Sekretariat DPRD.
<b>Kepala Bagian Umum dan Keuangan</b>														
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	IV	Selaras	Meningkatnya nilai Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Serapan Anggaran tercapai dalam kegiatan DPRD yang cukup besar di perjalanan dinas DPRD	akan lebih cermat dalam menyusun anggaran DPRD	35.108.214.776 / 86,23 %	Meningkatnya nilai Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	72,20 ( Nilai SAKIP tahn 2022 )	Capaian target di Sekretariat DPRD tercapai 100 % efisiensi anggaran kurang lebih 14 % dari total pagu Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota
<b>JF Analis Kebijakan Ahli Muda</b>														
1	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan Layanan administrasi keuangan	Waktu Penyediaan gaji dan tunjangan ASN,DPRD serta dokumen Perencanaan dan keuangan	12 bulan	72 bulan	12 bulan	IV	Selaras	Tersedianya dokumen perencanaan dan keuangan,serta gaji dan tunjangan lainnya	Masih belum dapat maksimal merencanakan anggaran dan kebutuhan belanja DPRD	Akan mengevaluasi kembali rencana kerja DPRD dengan kebutuhan	-	Waktu Penyediaan gaji dan tunjangan ASN,DPRD serta dokumen Perencanaan	12 Bulan	Target kinerja tercapai

2	<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana</b>	Persentase persediaan sarana dan prasarana yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	IV	Selaras	Tersedianya sarana penunjang kebutuhan perkantoran	Prasarana gedung utama untuk komisi DPRD tahap penataan ruang kerja	Evaluasi prasarana yang telah di sediakan agar dapat di fungsikan	-	Persentase persediaan sarana dan prasarana yang terpenuhi	100 %	Target Kinerja tercapai
<b>Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran</b>														
1	<b>Tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan tepat waktu</b>	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan laporan yang tersedia	18 dokumen	90 Dokumen	18 dokumen	IV	Selaras	Jumlah dokumen perencanaan,Anggaran dan penatausahaan yang tersedia	Renja DPRD belum tersusun maksimal	Koordinasi intens - dengan PPTK Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan laporan yang tersedia	100 %	Akan lebih memperhatikan kualitas penyusunan laporan perencanaan kinerja,penganggaran dan laporan keuangan
<b>Bendahara</b>														
1	<b>Menyusun dan mengadministrasikan keuangan</b>	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	50 dokumen	600 Dokumen	50 dokumen	IV	Selaras	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	Sering trobel di aplikasi CMSV	Koordinasi intens - dengan admin CMSV	-	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	100 %	Pengembalian UP tepat waktu
<b>Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan</b>														
1	<b>Mengumpulkan, Menyusun dan mengajukan kebutuhan rumah tangga kantor</b>	Jumlah kebutuhan rumah tangga kantor yang di susun	12 paket	60 paket	12 paket	IV	Selaras	Tersedia nya barang kebutuhan rumah tangga	Masih belum dapat maksimal dalam melaporkan barang Milid daerah yang ada di Sekretariat DPRD	Akan lebih aktif koordinasi dan merampungkan sensus aset daerah tepat waktu	-	Jumlah kebutuhan rumah tangga kantor yang di susun	85 %	Masih banyak data aset yang tidak di temukan , sehingga belum dapat maksimal menyelesaikan laporan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD

## Petugas Pengandaan

1	<b>Menerima dan mencatat pengandaan sesuai dengan prosedur</b>	Jumlah berkas yang di terima untuk di gandakan	50 Dokumen	600 Dokumen	50 Dokumen	IV	Selaras	Terselesaikan berkas yang di terima untuk di gandakan	Masih banyak dokumen SPJ yang belum lengkap tandatanganannya sehingga di tunda untuk menggandakan dan mengarsipkan dokumen SPJ	akan mengembalikan ke bidang sub koordinator kegiatan untuk dievaluasi dan melengkapi kelengkapan dokumen SPJ yang akan di gandakan	-	Jumlah berkas yang di terima untuk di gandakan	86 %	Dokumen SPJ triwulan IV belum selesai di susun dan di gandakan
---	--	--	------------	-------------	------------	----	---------	---	--	---	---	--	------	--

## Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

1	<b>Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Pengembangan Kapasitas DPRD</b>	Persentase Hasil pengembangan Kapasitas Anggota DPRD	Persentase Hasil pengembangan Kapasitas Anggota DPRD	Persentase Hasil pengembangan Kapasitas Anggota DPRD	Persentase Hasil pengembangan Kapasitas Anggota DPRD	IV	Selaras	Persentase Hasil pengembangan Kapasitas Anggota DPRD	Kegiatan Bimtek bersama tidak terlaksana karena tingginya intensitas kegiatan partai	Koordinasi intens dengan Seluruh Anggota DPRD dalam menyusun kembali rencana kerja bimtek bersama DPRD	1.326.361.000,- / 59,61 %	Persentase Hasil pengembangan Kapasitas Anggota DPRD	59,61 %	Belum dapat terlaksana dengan maksimal fasilitas pengembangan kapasitas DPRD
2	<b>Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD</b>	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas	IV	Selaras	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas yang terfasilitasi	Belum dapat maksimal memfasilitasi rapat paripurna karena belum quorum sehingga rapat di tunda dan di agendakan berikutnya	Koordinasi intens dengan Pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta pemerintah daerah	242.108200,- / 78,68 %	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas	78,68 %	Akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas rapat DPRD agar dapat terlaksana sesuai standar
3	<b>Meningkatnya pelayanan fasilitas rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah</b>	Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang sesuai standar	Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan	Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan	Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan	IV	Selaras	Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang sesuai standar	Dras usulan Raperda dari pemerintah daerah di triwulan IV akan di agendakan rapat kerja	Koordinasi intens dengan Pimpinan dan Bapemperda dalam menyusun agenda rapat kerja pembahas raperda	9.647.213.300,- / 83,68 %	Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan	83,68 %	Target Tercapai dari 20 Raperda usulan Pemerintah dan 3 Raperda Inisiatif telah difasilitasi rapat pembahasan, di finalisasi dan tuntas, kurang lebih 14 % efisiensi anggaran dari perjalanan dinas DPRD yang semula di rancang menggunakan penerbangan.

## JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

1	<b>Mengoptimalkan rencana kerja penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah</b>	Persentase rencana kerja yang terealisasi	IV	Selaras	Persentase rencana kerja rapat pembahasan raperda yang terealisasi	Masih ada raperda yang memerlukan harmonisasi dengan Kemenkumham	Koordinasi intens - dengan Bapemperda dan Komisi yang membidangi usulan raperda	Persentase rencana kerja yang terealisasi	100 %	Target dari 20 Usulan Raperda dari pemerintah daerah dan 3 dari Raperda inisiatif telah semuanya di fasilitasi rapat pembahasan,finalisasi serta harmonisasi			
---	--	---	---	---	---	----	---------	--	--	---	---	-------	--

## Penyusun Rancangan Perundang-undangan

1	<b>Tersedianya Naskah / draf /naskah akademik rapat penyusunan pembahasan pembentukan Peraturan daerah</b>	Jumlah Naskah / draf/naskah akademik yang tersedia	IV	Selaras	Jumlah produk hukum dan perundangan yang di siapkan	Naskah / draf usulan raperda dari Pemerintah yang di usulkan ke DPRD pada triwulan IV akan di jadwal rapat pembahasan di tahun berikutnya.	Koordinasi intens - dengan bidang hukum sekretariat Daerah	Jumlah Naskah / draf/naskah akademik yang tersedia	100 %	Naskah / draf raperda yang usulan baru telah diterima dan siap di agendakan rapat kerja pembahasan raperda			
---	--	--	--	--	--	----	---------	---	--	--	--	-------	--

## Pengadministrasi Umum

1	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan rapat penyusunan dan pembahasan pembentukan peraturan daerah</b>	Jumlah Rapat penyusunan dan pembahasan pembentukan peraturan daerah yang di fasilitasi	Jumlah Rapat penyusunan dan pembahasan pembentukan peraturan daerah yang di fasilitasi	Jumlah Rapat penyusunan dan pembahasan pembentukan peraturan daerah yang di fasilitasi	Jumlah Rapat penyusunan dan pembahasan pembentukan peraturan daerah yang di fasilitasi	IV	Selaras	Terfasilitasi rapat penyusunan dan pembentukan peraturan daerah	Rencana kerja rapat kerja dengan DPRD yang sering berubah-ubah	Koordinasi intens - dengan antar su bidanga dalam menyusun rapat kerja DPRD	Jumlah Rapat penyusunan dan pembahasan pembentukan peraturan daerah yang di fasilitasi	100 %	Belum teragendakan rapat kerja pembahasan raperda yang baru
---	---	--	--	--	--	----	---------	---	--	---	--	-------	---

## JF Analis Kebijakan Ahli Muda

1	<b>Terlaksananya pelatihan dan pengembangan kapasitas yang efektif</b>	Jumlah Anggota yang dilatih dan dikembangkan	IV	Selaras	Terfasilitasinya pengembangan kapasitas DPRD	Kurang optimal menjadwalkan rencana kerja Bimtek bersama DPRD	Koordinasi intens - dalam rapat kerja DPRD	Jumlah Anggota yang dilatih dan dikembangkan	59,81 %	Belum terjadwalkan kembali rencana kerja Bimtek bersama DPRD			
---	--	--	--	--	--	----	---------	--	---	--	--	---------	--

<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas anggota DPRD yang sesuai standart</b>	Penjadwalan rapat banmus / alat kelengkapan dewan lainnya	Penjadwalan rapat banmus / alat kelengkapan dewan lainnya	Penjadwalan rapat banmus / alat kelengkapan dewan lainnya	Penjadwalan rapat banmus / alat kelengkapan dewan lainnya	iv	selaras	Terfasilitasinya rapat banmus / alat kelengkapan dewan lainnya	Rapat kerja DPRD yang serng berubah	Koordinasi dengan Staf Komisi serta Pimpjian DPRD penjadwalan kerja Komisi yang di setujuai oleh Pimpinan DPRD	Penjadwalan rapat banmus / alat kelengkapan dewan lainnya	78.68 %	Belum konsistennya rencana kerja DPRD dengan pelaksanaannya
<b>Analisis Publikasi</b>												
<b>Terlaksananya pelatihan meningkatkan pemahaman pendalaman tugas fungsi Sebagai Anggota</b>	Jumlah Pelatihan yang terlaksana	IV	Selaras	Terfasilitasinya Pelatihan dan pendalaman tugas fungsi anggota DPRD	Rencana kerja Bimtek bersama DPRD tidak terlaksana karena tingginya intensistas kegiatan partai DPRD	Koordinasi dan evaluasi kebutuhan anggaran Bimtek DPRD	Jumlah Pelatihan yang terlaksana	59.81 %				
<b>Tersedianya program kerja DPRD</b>	Jumlah Dokumen rencana kerja DPRD	IV	Selaras	tersedianya Dokumen rencana kerja DPRD	Rencana kerja DPRD tahun 2024 dalam rapat kerja bersama	Koordinasi aktif DPRD	Jumlah Dokumen rencana kerja DPRD	100 %				
<b>Pengelola Persidangan</b>												
<b>Tersusunnya jadwal rapat kerja DPRD</b>	Jumlah Laporan Hasil rapat kerja DPRD	IV	Selaras	tersedianya Laporan Hasil rapat kerja DPRD	-	-	Jumlah Laporan Hasil rapat kerja DPRD	100 %				
<b>Petugas Protokol</b>												
<b>Tersusunnya jadwal rapat kerja DPRD</b>	Jumlah laporan Hasil Rapat kerja DPRD	IV	Selaras	Tersedianya laporan Hasil Rapat paripurna DPRD	Rapat belum terpenuhi sesuai standar	-	Jumlah laporan Hasil Rapat kerja DPRD	100 %	-			

## Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

<b>Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD</b>	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas	IV	Selaras	Persentase Fasilitas Hasil Pelaksanaan Tugas DPRD	Kurang aktif jadwal Rapat kerja pengawasan DPRD sesuai tugas Komisi	Koordinasi intens antar komisi dalam menyusun rapat kerja pengawasan	371.701.400.- / 100 %	Persentase Fasilitas Hasil Pelaksanaan Tugas DPRD	100 %	Koordinasi intens dengan ketua Komisi penjadwalan rapat kerja pengawasan, koordinasi dengan pendamping / staf komisi .			
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----	---------	---	---	--	-----------------------	---	-------	--

## JF Analisis Kebijakan Ahli Muda

<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas anggota DPRD yang sesuai standart</b>	Penjadwalan rapat alat kelengkapan dewan lainnya	IV	Selaras	Terfasilitasi rapat alat kelengkapan dewan lainnya Rapat Anggaran	Rencana kerja rapat yang sering berubah menyesuaikan kegiatan DPRD dan TAPD	Koorsinasi Intens internal dan lintas Sektor	-	Penjadwalan rapat alat kelengkapan dewan lainnya	100 %	Tersedianya jadwal rapat kerja pembahasan anggran tahun 2024 tingkat komisi			
<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan tugas anggota DPRD yang sesuai standart</b>	Persentase rapat alat kelengkapan dewan lainnya	IV	Selaras	Presentase fasilitas kegiatan reses yang telah di laksanakan	Terfasilitasinya rapat alat kelengkapan dewan lainnya	Rapat kerja pengawasan lintas sektor yang belum terjadwal rutin bulanan	-	Persentase rapat alat kelengkapan dewan lainnya	100 %	Jadwal rapat kerja pengawasan belum tersedia			

## Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

<b>Tersusunnya jadwal rapat kerja DPR</b>	Jumlah laporan hasil rapat kerja anggaran	Jumlah laporan hasil rapat kerja anggaran	Jumlah laporan hasil rapat kerja anggaran	Jumlah laporan IV hasil rapat kerja anggaran		Selaras	Tersedianya laporan hasil rapat kerja anggaran	-	-	-	Jumlah laporan hasil rapat kerja anggaran	4 Laporan	Rapat kerja anggaran Antara TAPD dan DPRD terfasilitasi 100 %
---	---	---	---	--	--	---------	--	---	---	---	---	-----------	---

## Pengadministrasi Umum

<b>Tersusunnya Laporan rekomendasi DPRD</b>	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRD	IV	Selaras	Tersedianya undangan rapat kerja DPRD dengan SKPD lain	-	-	-	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRD	3 Dokumen	Terfasilitasi 100 %			
---	--	--	--	--	----	---------	--	---	---	---	--	-----------	---------------------

Dari laporan hasil Evaluasi Kinerja triwulan IV dapat tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD telah mencapai progress perbaikan secara terus menerus target IKM pada Renstra lama telah tercapai dengan predikat sangat memuaskan .

Sasaran kinerja Meningkatnya nilai Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Balangan juga telah mencapai target Renstra lama dengan predikat BB , besar harapan kami nanti nya akan terus mampu memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap seluruh Anggota DPRD serta Pemerintah daerah kea rah yang lebih baik lagi.

Perbaikan terus terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar tujuan akhir dari target RPJMD Pemerintah Daerah dapat tercapai dan lebih baik lagi

Capaian/hasil kinerja tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang di fasilitasi adalah sebagai berikut :

REKAP PROPEMPERDA TAHUN 2023  
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188.342/31/DPRD-BLG/2022  
TANGGAL 19 DESEMBER 2022

NO	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL	KETERANGAN	TAHUN 2023
1	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pelestarian Kebudayaan Balangan (BARU)	PEMDA	Diusulkan pada tanggal 9 November 2022 & di paripurnakan dalam SK Propemperda Tahun 20023	FINAL
2	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyertaan Modal Berupa Barang Kepada PT Bank Kalsei	PEMDA	Diusulkan pada tanggal 9 November 2022 & di paripurnakan dalam SK Propemperda Tahun 20023	FINAL
3	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PEMDA	Diusulkan pada tanggal 9 November 2022 & di paripurnakan dalam SK Propemperda Tahun 20023	FINAL
4	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi	PEMDA	Diusulkan pada tanggal 9 November 2022 & di paripurnakan dalam SK Propemperda Tahun 20023	FINAL
5	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Balangan	PEMDA	Diusulkan pada tanggal 9 November 2022 & di paripurnakan dalam SK Propemperda Tahun 20023	LANJUT TAHUN 2024
6	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PEMDA	Diusulkan pada tanggal 9 November 2022 & di paripurnakan dalam SK Propemperda Tahun 20023	SELESAI
7	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022	PEMDA	Diusulkan pada tanggal 9 November 2022 & di paripurnakan dalam SK Propemperda Tahun 20023	SELESAI
8	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	PEMDA	Diusulkan pada tanggal 9 November 2022 & di paripurnakan dalam SK Propemperda Tahun 20023	SELESAI
9	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2024	PEMDA	Diusulkan pada tanggal 9 November 2022 & di paripurnakan dalam SK Propemperda Tahun 20023	SELESAI

10	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penggabungan Desa (BARU)	PEMDA	LANJUTAN TAHUN 2022	LANJUT TAHUN 2024
11	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	PEMDA	LANJUTAN TAHUN 2022	FINAL
12	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan SOTK Nmor 2 Tahun 2021	PEMDA	LANJUTAN TAHUN 2022	FINAL
13	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	PEMDA	LANJUTAN TAHUN 2022	FINAL
14	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Kearsipan	PEMDA	LANJUTAN TAHUN 2022	FINAL
15	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Rencana Tata Ruang Daerah	PEMDA	LANJUTAN TAHUN 2022	FINAL
16	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Bangunan Gedung	PEMDA	LANJUTAN TAHUN 2022	FINAL
17	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Pemukiman	PEMDA	LANJUTAN TAHUN 2022	FINAL
18	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat	PEMDA	LANJUTAN TAHUN 2022	FINAL
19	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Balangan	PEMDA	LANJUTAN TAHUN 2022	FINAL
20	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah	INISIATIF DPRD	LANJUTAN TAHUN 2022	LANJUT TAHUN 2024
21	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Gotong Royong Masyarakat	INISIATIF DPRD	LANJUTAN TAHUN 2022	LANJUT TAHUN 2024
22	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Perkebunan Karet	INISIATIF DPRD	LANJUTAN TAHUN 2022	LANJUT TAHUN 2024
23	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	INISIATIF DPRD	LANJUTAN TAHUN 2022	LANJUT TAHUN 2024
24	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim dan Fakir Miskin	INISIATIF DPRD	LANJUTAN TAHUN 2022	LANJUT TAHUN 2024
25	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Perwakilan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	INISIATIF DPRD	LANJUTAN TAHUN 2022	LANJUT TAHUN 2024
26	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	INISIATIF DPRD	LANJUTAN TAHUN 2022	LANJUT TAHUN 2024
27	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Kelembagaan Adat di Kabupaten Balangan	INISIATIF DPRD	LANJUTAN TAHUN 2022	LANJUT TAHUN 2024
15	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Rencana Tata Ruang Daerah	PEMDA	LANJUTAN TAHUN 2022	LANJUT TAHUN 2024

Ada 20 Raperda yang dari usulan Pemerintah Daerah dan 3 Raperda Inisiatif total raperda ada 23 yang telah di fasilitasi pembahasan raperda nya tercapai 100 % usulan raperda yang masuk di triwulan IV tahun 2023 akan di jadwal apat kerja pembahas raperda di tahun 2024 bersama DPRD Pemerintah Daerah dan SKPD pengusul rancangan raperda.

## 2. Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja sasaran strategis tidak terlepas dari Anggaran yang tersedia untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2023, perlu dilakukan perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Pada Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi dana sebesar Rp.47.473.676.326, - ( Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) berdasarkan dokumen berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengalami perubahan DPA-SKPD serta Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Balangan Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar **Rp. 62.644.362.476, -** ( *Enam Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tuju Puluh Enam Rupiah* )

Alokasi dana dimaksud diatas merupakan penjabaran dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 18.567.785.576, -** ( *Delapan Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*). Dan belanja Tidak langsung sebesar **Rp. 44.076.576.900, -** ( Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus *Rupiah*).

Realisasi keuangan dari belanja tidak langsung plafon dana **Rp. 18.567.785.576, -** terealisasi **Rp. 17.486.992.701, -** atau **95%** sedangkan dari belanja langsung **Rp. 44.076.576.900, -** terealisasi sebesar **Rp. 38.151.729.722,** atau 87 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel X. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023**

<b>No</b>	<b>Belanja</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>18.587.785.576,-</b>	<b>17.486.992.701,-</b>	<b>95 %</b>
	Belanja Pegawai	18.587.785.576,-	17.486.992.701,-	95
<b>2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>44.076.576.900,-</b>	<b>38.151.729.722,-</b>	<b>87 %</b>
	- Belanja Pegawai			
	- Belanja Barang dan Jasa	39.458.517.500,-	38.151.729.722,-	87
	- Belanja Modal	4.618.059.400,-		
	<b>Jumlah</b>	<b>62.664.362.476,-</b>	<b>55.638.722.423,-</b>	<b>88.80 %</b>

**Tabel XI. Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan**

N O	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / KURANG
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.007.559.951,-</b>	<b>31.003.752.063,-</b>	<b>81 %</b>	<b>7.003.807.888,-</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>437.908.000,-</b>	<b>331.425.269,-</b>	<b>76 %</b>	<b>81.111.331,-</b>
	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	70.009.800,-	64.170.000,-	92%	5.839.800,-
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	30.319.600,-	26.716.500,-	88 %	3.603.100,-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40.352.000,-	21.688.500,-	54 %	18.663.500,-
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	199.669.300,-	143.664.369,-	72 %	56.004.931,-
<b>1.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>3.491.563.546,-</b>	<b>2.599.512.149,-</b>	<b>74 %</b>	<b>193.556.969,-</b>
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	36.401.200,-	32.183.800,-	88 %	4.217.400,-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	54.000.800,-	35.954.600,-	66 %	18.046.200,-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.155.300	7.047.500,-	98 %	107.800,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.426.961.946,-	3.274.827.577,-	95 %	152.134.369,-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.366.500,-	16.131.000,-	93 %	1.235.500,-
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	15.676.700,-	13.661.000,-	87 %	2.015.700,-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.023.600,-	4.898.400,-	97 %	125.200,-
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	26.534.800,-	10.860.000,-	41 %	15.674.800,-
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>939.272.000,-</b>	<b>719.726.576,-</b>	<b>77 %</b>	<b>42.102.163,-</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	281.974.000,-	268.131.000,-	95 %	13.843.000,-
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	657.298.000,-	374.706.364,-	57%	282.591.636,-

<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.765.465.300,-</b>	<b>3.951.059.029,-</b>	<b>83 %</b>	<b>136.283.470,-</b>
	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	75.205.100,-	74.622.579,-	99 %	582.521,-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.036.286.700,-	990.359.900	95 %	45.926.800,-
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	95.830.800,-	93.264.000,-	97 %	2.566.800,-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	684.720.600,-	683.078.750	99 %	1.641.850,-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	108.377.100,-	108.143.800,-	99 %	233.300,-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	214.658.500,-	211.136.000	98 %	3.522.500,-
	Penyediaan Bahan/Material	135.888.000,-	110.185.625	81 %	25.702.375,-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	199.600.000.-	190.000.000	95 %	9.600.000,-
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.101.240.000,-	2.054.732.676	98 %	46.507.324,-
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.500.000.000,-</b>	<b>2.252.049.000,-</b>	<b>91 %</b>	<b>445.267.324,-</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700.000.000	472.300.000,-	67 %	227.700.000,-
	Pengadaan Mebel	830.000.000	818.350.000,-	98 %	11.650.000,-
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	970.000.000	961.399.000,-	99 %	8.601.000,-
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.277.850.900</b>	<b>2.794.368.043,-</b>	<b>85 %</b>	<b>483.482.857,-</b>

	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	491.100.000,-	373.966.386,-	76 %	117.133.614,-
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	145.495.400,-	102.375.000,-	70	43.120.400,-
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.641.255.500,-	2.318.026.657,-	86 %	323.228.843,-
<b>1.7</b>	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2.089.294.100,-	2.055.598.266	98 %	33.695.834,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	231.664.600,-	229.395.589,-	99 %	2.269.011,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	436.340.500,-	428.712.746,-	98 %	7.627.754,-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.265.000,-	181.250.000,-	93 %	13.015.000,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.227.024.000,-	1.216.239.931,-	99 %	10.784.069,-
<b>1.8</b>	Layanan Administrasi DPRD	1.751.149.900,-	1.587.219.172,-	91 %	163.930.728,-
	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah	1.751.149.900,-	1.587.219.172,-	91 %	163.930.728,-
<b>1.9</b>	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.969.369.530,-	14.992.629.788	94 %	976.739.742,-
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	15.140.823.630,-	14.992.629.788,-	99 %	1.48.193.842,-
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	800.545.900,-	747.410.000,-	93 %	53.135.900,-
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	28.000.000	0	0	28.000.000.-

<b>2</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	27.536.147.700,-	23.146.694.214	84 %	4.389.453.486,-
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	9.647.213.300,-	8.073.020.208,-	84 %	1.574.193.092,-

	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.116.761.000,-	1.769.091.113,-	84 %	347.669.887,-
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.686.224.500,-	4.783.183.152	85 %	903.041.348,-
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.325.147.800,-	1.026.665.943,-	77 %	298.481.857,-
	Penyusunan Tata Tertib DPRD				
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	519.080.000,-	494.080.000,-	95 %	25.000.000,-
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>205.156.800</b>	<b>195.322.000,-</b>	<b>95 %</b>	<b>9.834.800,-</b>
	Pembahasan KUA dan PPAS	15.968.800,-	13.500.000,-	84 %	2.469.800,-
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	12.452.200,-	12.000.000	96 %	452.000,-
	Pembahasan APBD	85.456.800,-	84.966.000,-	99 %	490.800,-
	Pembahasan APBD Perubahan	82.889.000,-	79.856.000,-	96 %	3.033.000,-
	Pembahasan Laporan Semester	2.942.800,-	0,-	0 %	2.942.800,-
	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	5.447.200,-	5.000.000,-	92 %	447.200,-
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>166.545.400,-</b>	<b>152.104.000,-</b>	<b>91 %</b>	<b>40.835.000,-</b>
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	21.087.600,-	18.587.600	88 %	2.500.000-
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	19.716.400	19.016.400	96 %	700.000,-
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	18.042.000	17.500.000	97 %	542.000,-

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16.035.200,-	15.500.000	97 %	535.200,-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	7.866.400	7.500.000	96 %	366.400,-
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.904.600	0	0 %	2.904.600,-
Pengawasan Penggunaan Anggaran	20.539.200,-	14.000.000	68 %	6.539.200,-
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	60.354.000,-	60.000.000	94 %	354.000,-
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>3.549.129.200</b>	<b>2.714.356.830</b>	<b>76 %</b>	<b>834.772.370,-</b>
Bimbingan Teknis DPRD	1.326.361.000,-	928.378.803,-	70 %	398.004.170,-
Orientasi DPRD	0	0	0 %	0
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.928.178.200,-	1.679.661.700,-	87 %	248.516.500,-
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0	0	0 %	0
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	0	0	0 %	0
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	88.675.000,-	81.311.000,-	92 %	7.364.000,-
Penyusunan Program Kerja DPRD	205.915.000,-	160.150.000,-	78 %	45.765.000,-
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>2.474.596.300,-</b>	<b>2.395.656.200,-</b>	<b>97 %</b>	<b>78.940.100,-</b>

	Kunjungan Kerja dalam Daerah	57.150.000	37.745.000,-	66 %	19.405.000,-
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	59.717.300,-	49.530.400,-	83 %	10.186.900,-
	Pelaksanaan Reses	2.357.729.000	2.308.380.800,-	98 %	49.348.200,-
	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>503.263.600,-</b>	<b>295.692.059,-</b>	<b>59 %</b>	<b>207.571.541,-</b>
	Fasilitasi, Verifikasi ,dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	0			
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	503.263.600,-	295.692.059,-	59 %	207.571.541,-
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>10.990.243.100</b>	<b>9.320.542.917</b>	<b>85 %</b>	<b>1.669.700.683,-</b>
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.591.737.800	9.025.517.917,-	85 %	1.566.219.883,-
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	88.797.100,-	48.325.000,-	54 %	40.472.100,-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	67.600.000,-	56.200.000,-	83%	11.400.000,-
	Fasilitasi Tugas DPRD	242.108.200,-	190.500.000,-	79 %	51.608.200,-

## 2. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan, Hambatan/Kegagalan dan Solusi

Penilaian terhadap capaian kinerja kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan tahun 2023 ini tidak terlepas dari kendala-kendala dan hambatan- hambatannya. Dibawah ini diuraikan faktor-faktor penyebab keberhasilan, hambatan dan solusi untuk pencapaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, yang terdiri dari:

### • **Penyebab Keberhasilan**

1. Dukungan Anggaran yang besar dari Kepala Daerah dalam mendukung Fasilitasi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2. Penyusunan rencana ,kegiatan ,anggaran dan target kegiatan yang mulai tersusun baik.
3. Komitmen Bersama perbaikan kinerja ke arah SAKIP yang lebih baik.

### • **Hambatan atau Kendala**

Adapun Hambatan/Kendala dalam pencapaian kinerja terhadap Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD serta kualitas pelayanan sekretariat DPRD terhadap anggota dewan yaitu:

1. Pada setiap kegiatan rapat tentunya harus berdasarkan kourum, baik 1/2 maupun 2/3 atau 3/4 dari Anggota baik itu untuk melaksanakan rapat maupun untuk mengambil keputusan sebagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah maupun sesuai tata tertib DPRD sehingga dari beberapa jadwal rapat yang telah dijadwalkan harus tertunda atau dibatalkan karena kourum tidak terpenuhi karena kehadiran yang tidak mencukupi atau karena proses negosiasi politik yang tidak mencapai kesepakatan
2. Padatnya jadwal kunjungan kerja pimpinan dan anggota dewan, sehingga tidak dapat memastikan waktu kegiatan rapat
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam Pencapaian Kinerja
4. Jadwal kegiatan Anggota Dewan yang selalu berubah.
5. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

- **Solusi /Strategi Pemecahan Masalah**

Berkaitan dengan kendala/hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dalam mewujudkan kinerja utama ditahun 2023 perlu dilakukan upaya pemecahan masalah/solusi, agar ke depannya sekretariat DPRD Kab. Balangan dapat meningkatkan kinerjanya, baik dari segi dari indikator kinerja utama (IKU), anggaran serta strategi pemecahan masalahnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Membuat rancangan/penjadwalan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan pada tatib DPRD.
2. Memanfaatkan atau memaksimalkan Web.site dprd sebagai informasi kegiatan DPRD secara Berkala.
3. Menjalin komunikasi yang intens dengan masing-masing staf komisi perihal agenda rapat yang akan dilaksanakan.
4. Adanya pembagian program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi agar dapat menyajikan target dan capaian indikator dengan baik.
5. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai ASN dan penempatan yang sesuai dengan kompetensi untuk mendukung optimalisasi pelayanan Sekretariat DPRD.

#### 4. Analisa atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas Efisiensi Penggunaan sumber daya Dalam rangka menunjang tercapainya Program Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan sebesar **Rp. 62.644.362.476,-** terealisasi sebesar **Rp. 55.638.722.423,-** yang terealisasi atau sebesar 89 %.

Efisiensi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel XII. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Efisiensi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.108.214.776,-	32.492.028.209,-	2.616.186.567,-	8 %
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.536.147.700,-	23.146.694.214,-	4.389.453.486,-	15 %
	Jumlah	<b>62.644.362.476,-</b>	<b>45.308.401.318</b>	<b>7.005.640.053,-</b>	<b>23 %</b>
	<b>Total Belanja langsung</b>	<b>62.644.362.476,-</b>	<b>45.308.401.318</b> <b>,-</b>	<b>7.005640.053,-</b>	<b>23 %</b>

Pada Kegiatan di atas efisiensi anggaran karena pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan efektif pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, dan Fasilitasi Tugas DPRD.

Pada APBD perubahan 2023 kegiatan DPRD di program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD di susun berdasarkan tingginya intensitas permintaan semua anggota DPRD agar kebutuhan fasilitas perjalanan dinas DPRD sudah disesuaikan dengan aturan Perpres terbaru yang mengatur tarif dan biaya perjalanan dinas seluruh anggota DPRD dengan tarif Lumpsum. Tingginya biaya – biaya yang harus kami sesuaikan dengan dasar pertama adalah Perpres 33 tahun 2023 yang kemudian akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing daerah otonomi.

Tahapan penyusunan Anggaran Perubahan tahun 2023 Sekretariat  
DPRD

Menyusun dengan acuan perpres 33 tahun 2023, dengan juknis yang belum begitu jelas bagaimana perhitungan pertanggungjawabannya sehingga kami Menyusun dengan asumsi tertinggi dengan menggunakan asumsi penerbangan.

Setelah APBD perubahan di Sahkan dan perbup perjalanan dinas  
DPRD

yang di sesuaikan dengan perpres 33 tahun 2023 dan data dukung lampiran perjalanan dinas yang harus di lampirkan dalam pertanggungjawaban bukti perjalanan dinas, hal ini berdampak juga pada berubahnya rencana kerja kegiatan DPRD.

Jika Kita lihat dari capaian target kinerja yang di capai di Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tercapai cukup tinggi, Sub kegiatan pembahasan raperda target 23 Raperda telah tercapai fasilitasi pembahasan raperda, dan telah finalisasi , target pembahasan anggaran dan pengawasan tercapai 100 % dan sisa anggaran murni telah di pindah ke sub kegiatan yang lain efisiensi dan efektifitas anggaran telah terukur dan terarah dengan baik.

Sub kegiatan Pendalaman tugas DPRD tidak terlaksana dengan efektif hal ini karena tingginya intensitas kegiatan partai dari pengusung DPRD itu sendiri, yang tidak di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD juga kurang dapat efektif di gunakan karena belum mampu dengan tepat menghitung kebutuhan perjalanan dinas seluruh anggota DPRD , kelemahan kami dalam setiap kali Menyusun perencanaan kebutuhan kegiatan Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah rencana kerja DPRD yang dinamis diluar dari kesepakatan oleh DPRD Balangan itu sendiri.

Kedepan kami terus berupaya meminimal hal tersebut di atas terulang, dan dapat Menyusun perencanaan kegiatan , anggaran yang efektif dan efisiensi serta target kinerja yang dapat tercapai maksimal.

## BAB IV

### **KINERJA LAINNYA**

Dalam Upaya mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Balangan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah berupaya terus memperbaiki pelayanan dalam memfasilitasi seluruh kegiatan dalam program dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut.

Berikutnya ada beberapa kinerja lainnya yang telah berprogres kearah yang lebih baik dari tahun ke tahun dengan harapan kami dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap seluruh anggota DPRD dan Pemerintah Daerah serta menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kebanggaan Masyarakat Balangan.

Sudah aktifnya JDIH DPRD Kabupaten Balangan , merupakan wadah mengakses produk hukum yang di keluarkan oleh DPRD Balangan yang dapat di akses pada website JDIH



**EVALUASI PELAKSANAAN JDIHN  
PADA DPRD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023**

**I. ORGANISASI**

Nama Instansi	DPRD Kabupaten Balangan
Nomenklatur JDIH	Sub Kajian Perundang-Undangan
Alamat	JL.Akhmad Yani Km 2,5 Paringin Kab. Balangan Kalimantan Selatan
Kodepos	71617
Telepon	081528428187 (admin)
Faksimili	0526 2094195
Website Utama	<a href="http://dprd-balangankab.go.id/">http://dprd-balangankab.go.id/</a>
Website JDIH	<a href="https://jdih-dprd.balangankab.go.id/">https://jdih-dprd.balangankab.go.id/</a>
Email	humas.dprd.balangan@gmail.com / peruuansetwan.blg@gmail.com
Jumlah anggota JDIH di lingkungan/wilayah JDIH	29
Jumlah UPT/OPD	2
Tahun Berdiri	2021
Tahun Integrasi	2021
Dasar Hukum Pembentukan JDIH	terlampir pdf
SK Tim Teknis	terlampir pdf
SOP Pengelolaan JDIH	terlampir pdf

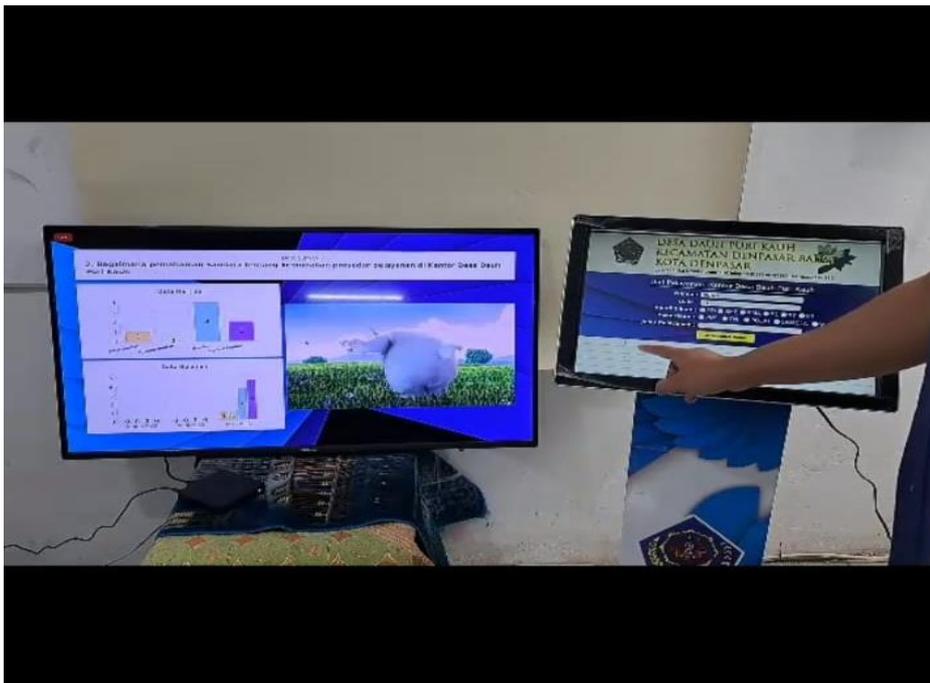
**II. SUMBER DAYA MANUSIA (Pada Biro, Bagian, Bidang, dan Lainnya)**

**Kepala Bagian**

Nama H. HASAN NOR ARIFIN, SH, MH

Tersedianya mesin survey pelayanan agar dapat mempermudah melakukan survey penilaian IKM terhadap 6 unsur pelayanan yang ada di Sekretariat DPRD Balangan, di upayakan akan di aktif kan di tahun 2024 mesin survey IKM ini di oprasikan dengan sesuai standar kuisisioner Permenpan nomor 14 tahun 2017.

Data Induk di aplikasi suvey belum di sesuaikan .



Sosial media yang mulai hidup dan aktif dalam menyajikan informasi kegiatan seluruh Anggota DPRD yang dapat di akses melalui Website DPRD Balangan, Instagram publikasidprdbalangan.



[www.dprd-balangankab.go.id](http://www.dprd-balangankab.go.id)



# Buletin WARTA DPRD

Edisi Triwulan I/2022

*Lugas dan Informatif*

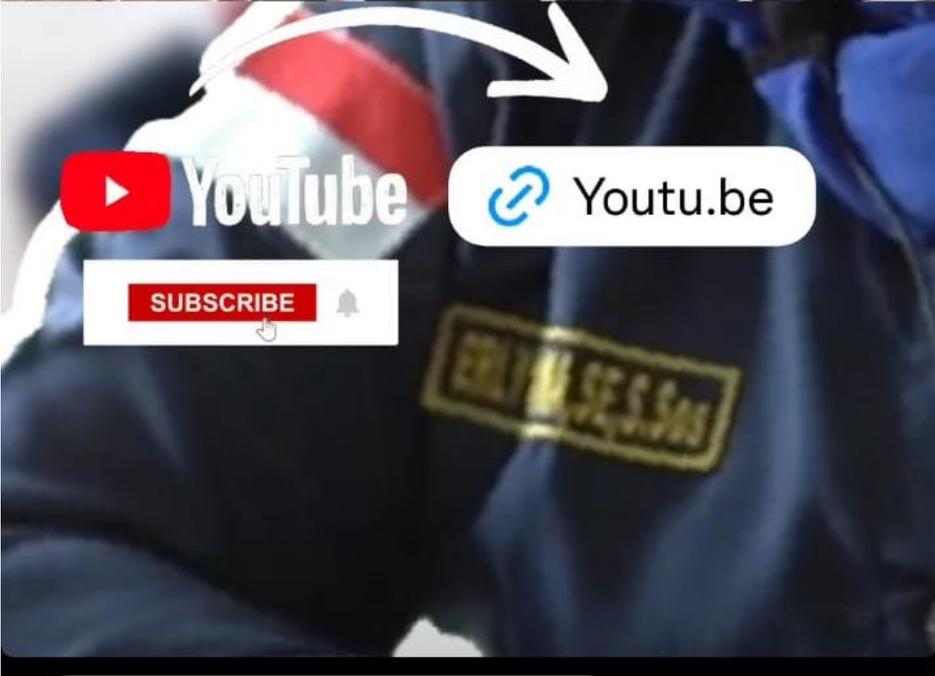


#### KONTEN MAJALAH :

- DPRD BALANGAN BUKA MASA SIDANG SATU TAHUN PERSIDANGAN 2022
- DPRD BALANGAN HIMBAU SATGAS COVID 19 LAKUKAN KEMBALI SOSIALISASI TENTANG VAKSIN ANAK
- DPRD KESTAPAN PEMILU 2024, DPRD BALANGAN BAHAS BERSAMA KESBANGPOL DAN KPU
- PENYERAHAN LHP OLEH BPK, SANGAT PENTING UNTUK PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
- KETUA DPRD BALANGAN DUKUNG PELAKSANAAN Ops PATUH INTAN 2022
- KOMISI III DPRD BALANGAN PANTAU PERBAIKAN JEMBATAN PARINGIN
- ANGGOTA DPRD BALANGAN MELALUI KOMISI III LAKUKAN TINJAUAN JALAN DEESA BINUANG SANTANG
- DPRD MENGENAI PENOLAKAN LPK Eks IPKM MENJADI BUMDESMA
- DPRD BALANGAN GELAR RDPJ UNTUK CARI TITIK TERANG TERKAIT BATAS WILAYAH DAYAK PITAP

[ONLINE.PUBHTML5.COM](https://ONLINE.PUBHTML5.COM)





## BAB V

### PENUTUP

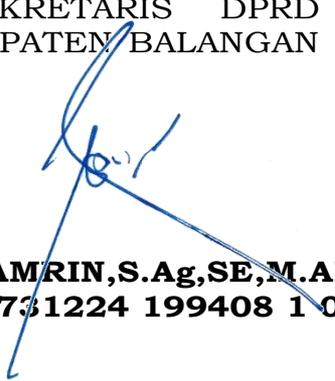
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKIP sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan pada hakikatnya untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus meningkatkan profesionalisme, memberikan suatu pelayanan serta menampilkan berbagai jasa pelayanan yang memberikan arti dan makna bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan Balangan.

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja, Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (**good governance**) dan pemerintah yang bersih (**clean government**).

Paringin, Januari 2024.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BALANGAN



**H. TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP**  
**NIP.19731224 199408 1 007**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN**  
JL. A YANI KM 2,5 KECAMATAN PARINGIN SELATAN KELURAHAN BATU PIRING  
KALIMANTAN SELATAN KODE POS 71618